

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI ZAKAT,
INFAK/SEDEKAH (PSAK 109), SISTEM INFORMASI AKUNTANSI,
PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI AMIL TERHADAP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA ZAKAT DI
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

Rina Widiyanti

1805046020

S-1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2022



Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Rina Widiyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Rina Widiyanti

NIM : 1805046020

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (Psak 109), Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Amil terhadap *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Zakat di Kabupaten Pati

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 September 2022

Pembimbing I

H. Johan Arifio S. Ag., M.M.

NIP. 197109082002121001

Pembimbing II

Dwi Swasana Ramadhan, M.SEI

NIP. 199403032019031014



PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rina Widiyanti
NIM : 1805046020
Judul : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (Psak 109), Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Amil Terhadap *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Zakat Di Kabupaten Pati

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 3 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus serta telah diterima sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam ilmu Akuntansi Syariah.

Semarang, 3 Oktober 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Sekretaris Sidang

H. Johan Arifio, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

Penguji I

Faris Shalahuddin Zakiy, SE., MCE
NIP. 199002272019031012

Penguji II

Ana Zahrotun Nihayah, S.E., M.A.
NIP. 198907082019032018

Pembimbing I

H. Johan Arifio, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

Pembimbing II

Dwi Swasana Ramadhn, SE., M.SEI
NIP: 1990102018011001

MOTTO

“Setiap dari Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”

(HR. Bukhori & Muslim)

“Yang paling sulit adalah keputusan untuk bertindak, sisanya hanya keuletan.”

(Amelia Earhart)

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja penulis sendiri dan tidak mengandung materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan . Dengan demikian, materi yang ditulis bukan merupakan pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 22 September 2022

Rina Widiyanti
NIM. 1805046020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata – kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Lengkap

النَّاس	Ditulis	Annasi
عَدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

Semuatā' *marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
بركه	Ditulis	Berkah
هديه	Ditulis	Hidayah

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhammah	Ditulis	U
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
أَجَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Ajira</i>
سَكَّرَ	Dhammah	Ditulis	<i>Sakuru</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
3. Dhammah + wawumati يَعْلَمُونَ	Ditulis	<i>ya'lamūn</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati (بَيْع)	Ditulis	<i>Baia</i>
2. Fathah + wawumati (فَوْق)	Ditulis	<i>Fauqo</i>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati baik secara parsial, maupun secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis linier regresi berganda dengan program SPSS. Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji parsial (T) dan uji simultan (F) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian melalui uji parsial (T) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi ZIS (PSAK 109), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.660 atau sebesar 66%.

Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi ZIS (PSAK 109), Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Kompetensi Amil Dan *Good Corporate Governnace*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat dan karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109), Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Amil terhadap *Good Corporate Governance*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa bangga dan bahagia, penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku penanggungjawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si, Akt. CA., CPA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. H. Johan Arifin, S.Ag., MM. dan Dwi Swasana Ramadhan, M.SEI, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak membekali berbagai macam pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Supriyono dan Ibu Yumiatur yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang baik berupa dukungan,

materi, dan doa yang tak pernah berhenti demi keberhasilan selesainya skripsi ini.

7. Alm. Drs. KH. Muhammad Sarjuli, S. H., MSI., selaku guru, orang tua, dan sosok yang telah memberikan banyak peran dan kebaikan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
8. Mas Iksan Saiful Fikri yang telah banyak membantu dan memberi saran, serta yang selalu menjadi support system dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar TPQ Asy-Syuhada' Ngaliyan Semarang yang telah banyak membersamai lika-liku perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman kader KOPMA Walisongo 2018 yang telah memberikan dukungan
11. Teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Jurusan Akuntansi Syariah A 2018.
12. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 September 2022

Penulis

Rina Widiyanti

1805046020

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian.....	6
5. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 LANDASAN TEORI	8
2.1.1 Pengertian Zakat.....	8
2.1.2 Manfaat dan Tujuan Zakat	10
2.1.3 Syarat-Syarat Zakat.....	12
2.1.4 Jenis-Jenis Zakat.....	13
2.1.5 Penerima Zakat	15

2.1.6	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109	16
2.1.7	Sistem Informasi Akuntansi	23
2.1.8	Pengendalian Internal.....	27
2.1.9	Kompetensi Amil.....	31
2.1.10	<i>Good Corporate Governance</i>	34
2.2	PENELITIAN TERDAHULU	38
2.3	KERANGKA PEMIKIRAN	42
2.4	PENGEMBANGAN HIPOTESIS	43
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN		48
3.1	JENIS DAN SUMBER DATA	48
3.2	METODE PENGUMPULAN DATA	48
3.3	POPULASI DAN SAMPEL	49
3.4	DEFINISI OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN DAN SKALA PENGUKURAN	49
3.5	TEKNIK ANALISIS DATA	52
3.5.1	Statistik Deskriptif	52
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	53
3.5.3	Uji Instrumen Penelitian	55
3.5.4	Uji Ketepatan Model.....	56
3.5.5	Analisis Linier Regresi Berganda	57
3.5.6	Uji T (Hipotesis)	58
BAB IV: PEMBAHASAN		59
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	59
4.1.1	BAZNAS Kabupaten Pati	59
4.1.2	LAZ Kabupaten Pati	62
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	67
4.2.1	Analisis Deskriptif	67
4.2.2	Uji Instrumen Penelitian	71
4.2.3	Uji Asumsi Klasik.....	74
4.2.4	Uji Ketepatan Model.....	77
4.2.5	Analisis Linier Regresi Berganda	78

4.2.6 Uji T	80
4.3 Pembahasan dan Analisis Data	82
BAB V: PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Keterbatasan Penelitian	89
5.3 Saran-Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran.....	49
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden.....	68
Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Responden.....	68
Tabel 4.3 Jenis Lembaga Zakat	69
Tabel 4.4 Uji Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.5 Uji Validitas	71
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas	73
Tabel 4.7 Uji Normalitas.....	74
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas	75
Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas.....	76
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi	77
Tabel 4.11 Uji F.....	78
Tabel 4.12 Uji Analisis Linier Regresi Berganda.....	78
Tabel 4.13 Uji T (Hipotesis).....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penerimaan & Pengeluaran BAZNAS.....	5
Gambar 2.1 Prosedur Penerimaan ZIS.....	
Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku dan agama. Di antara agama-agama yang ada di Indonesia, Islam merupakan agama dengan penganut mayoritas. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 setara dengan 86,9% dari populasi penduduk di Indonesia¹. Dengan jumlah populasi muslim yang tinggi, tentu menjadi peluang yang baik untuk kegiatan zakat, mengingat zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi kewajiban untuk setiap muslim.

Zakat ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dari segi istilah fiqih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak². Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat tidak hanya untuk kepentingan spiritual, namun juga untuk kepentingan sosial. Landasan pelaksanaan zakat telah banyak disebutkan dalam A-Qur'an. Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 32 kali dan 82 kali diulang dengan kata yang mengandung makna yang sama dengan zakat, yaitu *shadaqah* dan *infaq*³. Banyaknya kata zakat dan pengulangan tersebut memiliki makna bahwa dalam Islam zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting.

Selain zakat, terdapat kegiatan lain yaitu infak dan sedekah. Infak dan sedekah merupakan kegiatan yang bersifat sunnah atau sukarela, berbeda dengan zakat yang bersifat wajib untuk seluruh muslim. Jika zakat ditentukan mengenai jumlah, ukuran, dan waktu pelaksanaannya, infak dan

¹<https://dataindonesia.id> di akses pada tanggal 19 maret 2022

²Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.6

³*Ibid.*, hlm. 24

sedekah tidak ditentukan mengenai jumlah, ukuran dan waktu pelaksanaannya. Kegiatan infak dan sedekah ini didasarkan pada kesukarekaan individu untuk mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat.

Dengan banyaknya populasi muslim di Indonesia dan besarnya potensi zakat, infak dan sedekah, maka diperlukan tempat yang dapat dipercaya untuk menghimpun dan mengelola zakat, infak dan sedekah tersebut. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 disebutkan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang selanjutnya disebut BAZNAS. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dapat dibantu oleh lembaga zakat yang dibentuk masyarakat yang disebut dengan LAZ, sebagaimana Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 8 yang berbunyi bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁴.

BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga publik berorientasi nonlaba. Lembaga tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Mengingat pentingnya peran OPZ bagi masyarakat, pada tahun 2015 dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 333 yang bertujuan agar pengelolaan zakat pada OPZ dapat dijalankan secara profesional dan mewujudkan tata kelola yang baik dengan tujuan menciptakan manajemen dan kinerja yang semakin meningkat pada OPZ. Untuk menciptakan tata kelola yang baik, maka OPZ perlu menerapkan sistem *good corporate governance*. *Good corporate governance* diartikan sebuah tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

⁴Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm: 58

kemandirian dan kewajaran⁵. Transparansi berarti adanya keterbukaan informasi dan kemudahan untuk mengakses informasi. Akuntabilitas berarti informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Responsibilitas berarti organisasi melaksanakan kegiatannya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Kemandirian berarti suatu organisasi dijalankan secara profesional tanpa adanya tuntutan atas kepentingan pihak tertentu. Kewajaran atau kesetaraan berarti pengurus dapat berlaku adil dan sama rata kepada seluruh *stakeholder*, memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada seluruh *stakeholder* sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Sistem *Good Corporate Governance* dalam lembaga zakat sangat penting untuk dijalankan, karena dengan adanya tata kelola yang baik dalam lembaga zakat akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan masyarakat yang mana merupakan hal utama bagi berlangsungnya kegiatan pada OPZ. Jika terdapat kepercayaan dari masyarakat kepada OPZ, maka antusiasme mereka untuk membayar zakat melalui OPZ akan meningkat dan berdampak pada meningkatnya dana zakat yang terhimpun. OPZ dapat mewujudkan *good corporate governance* dengan melakukan beberapa hal penting sebagai berikut: terdapat pedoman dan prosedur operasional standar, kompetensi dan pelatihan, dewan pengawas syariah, sistem informasi akuntansi yang didukung sistem informasi terintegrasi, struktur organisasi yang sesuai, menyediakan media yang transparan dan aspiratif, mengembangkan *e-governance* dan sistem pengendalian internal⁶.

Transparansi dalam suatu organisasi dapat diwujudkan dengan memiliki sistem informasi akuntansi yang terintegritas, tepat dan mudah

⁵Dariana dan Ruzita, *Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Implementasi Good Corporate Governance*, STIE Syariah Bengkalis: Jurnal Akuntansi Syariah, Vol 3 No 2, 2019, hlm. 148

⁶Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019) hlm: 89-94

dipahami. Selain itu, transparansi juga dapat diwujudkan dengan menyediakan media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat terkait informasi pengelolaan zakat. Akuntabilitas suatu organisasi dapat diwujudkan dengan adanya prosedur dan pedoman sesuai dengan standar yang berlaku. Responsibilitas atau pertanggungjawaban dapat diwujudkan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal yang baik menuntut pengurus untuk menjalankan semua kegiatan berdasarkan aturan yang berlaku, agar dapat dipertanggungjawabkan secara tepat kepada dewan pengawas maupun masyarakat luas. Kemandirian dapat diwujudkan dengan memiliki pengurus yang kompeten, profesional, serta memberikan pelatihan kerja kepada seluruh pengurus sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Kewajaran dapat diwujudkan dengan adanya pengurus yang amanah dan adil kepada muzakki.

Terdapat beberapa kasus penyelewengan terkait dana zakat yang ada di Indonesia ini. Kasus pengunduran 5 pimpinan BAZNAS Kabupaten Batang pada tahun 2021 diduga karena adanya penyelewengan dana zakat sejak tahun 2019. Penyelewengan itu dilakukan oleh pihak pembantu keuangan terhadap zakat ASN yang diperoleh dari 800 pegawai Kementerian Agama Batang⁷. Selain kasus tersebut terdapat kasus penyelewengan dana dan pencucian dana umat tahun 2022 pada yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dalam hal ini diduga terjadi penyelewengan dana dan pencucian dana yang dilakukan oleh 4 petinggi yayasan Aksi Cepat Tanggap. Menurut temuan PPATK terdapat dana masuk dari luar negeri sebesar 64,9 miliar dan dana yang dialirkan keluar negeri sebesar 52,9 miliar yang tidak sesuai diperuntukannya, diduga untuk kegiatan terorisme⁸. Dengan adanya beberapa kasus tersebut, maka perlu adanya pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat dalam organisasi pengelola agar

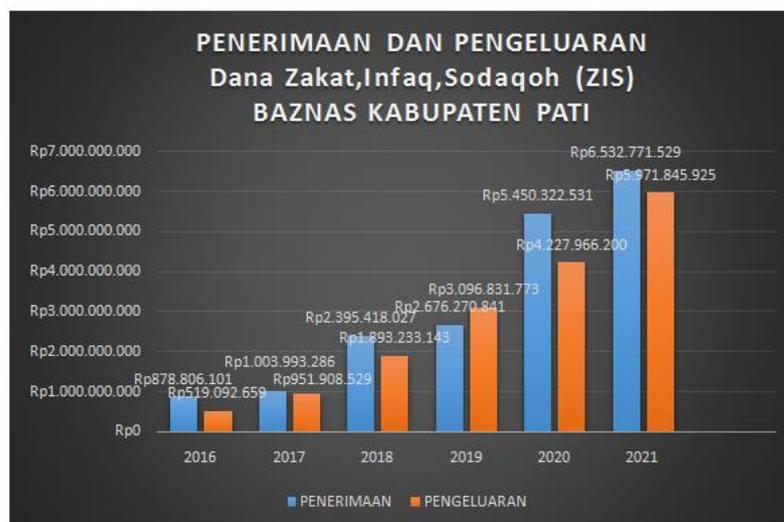
⁷ <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/batang/2021/09/17/dana-zakat-diduga-dikorupsi-lima-pimpinan-baznas-batang-mundur/> diakses 4 Oktober 2022

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka> diakses 4 Oktober 2022

terhindar dari kegiatan penyelewengan, korupsi, dan yang lainnya terhadap dan aumat yang telah diamanahkan.

Lembaga pengelola zakat Kabupaten Pati dalam hal penghimpunan zakat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2021. Berikut grafik penerimaan zakat BAZNAS Kabupaten Pati:

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan & Pengeluaran BAZNAS⁹



Berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Pati sekitar 90% muzakki yang membayar zakat, infak dan sedekah kepada lembaga zakat hanya berasal dari ASN yang mana merupakan bentuk otorisasi dari pemerintah Kabupaten Pati dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pati No 75 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Bada Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati¹⁰. Pada tahun 2021, penghimpunan dana zakat di Kabupaten Pati sudah mencapai 5 M, dan memfokuskan penghimpunan dana zakat untuk tahun 2022 agar dapat mencapai 6 M. karena lembaga zakat Kabupaten Pati sudah memiliki otorisasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Pati dan penghimpunan dana yang sudah cukup besar, maka bisa

⁹ Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati 2021

¹⁰<https://jdih.patikab.go.id> diakses pada 3 Juni 2022 jam 20.10

dikatakan lembaga zakat Kabupaten Pati seharusnya sudah menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, organisasi pengelola zakat Kabupaten Pati masih terdapat beberapa persoalan. Salah satu organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Pati telah diaudit secara eksternal dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut¹¹. Hal ini membuktikan bahwa telah diterapkannya PSAK 109 secara baik dan tepat di Organisasi pengelola zakat di Kabupaten Pati. Namun masih terdapat pencatatan laporan keuangan yang masih sederhana dan belum sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan organisasi pengelola zakat ini masih terbilang baru dan perlu adanya penyesuaian. Dalam hal pencatatan laporan keuangan, seluruh organisasi zakat yang ada di Kabupaten Pati masih terbilang semi sistem dikarenakan hanya menggunakan aplikasi excel. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengembangkan sistem informasi pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Pati dan masih banyak pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi pekerjaan sebagai amil.

Dalam hal pengendalian internal, 3 dari 5 organisasi zakat yang ada di Kabupaten Pati telah melaksanakan pengendalian internal yang cukup bagus dengan adanya pelaksanaan sistem evaluasi kinerja, rapat rutin, penerapan sanksi terhadap pihak yang melakukan penyelewengan, dan pelaksanaan audit secara eksternal. Namun masih terdapat organisasi zakat yang belum melaksanakan pengendalian internal yang baik, terutama pada organisasi pengelola zakat yang baru berdiri 1 tahun, yaitu Lazis Jabalnur. Pada Lazis Jabalnur sistem evaluasi kinerja masih belum terlaksana, pegawai yang memiliki pekerjaan lain dan sebagai amil hanya sebatas pekerjaan sampingan sehingga tidak bisa stay di Kantor sesuai jadwal tidak

¹¹ Dokumen Laporan tahunan LazisMu Kabupaten Pati tahun 2021

diberikan sanksi. Beberapa hal tersebut menjadi *fenomena gap* dalam penelitian ini.

Variabel independen pertama yaitu penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109), berdasarkan penelitian yang dilakukan Dariana Ruzita (2019) menyatakan bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan 109 berpengaruh secara positif signifikan terhadap implementasi *good corporate governance* pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Namun dalam penelitian Sulastiningsih (2019) dengan judul analisis pengaruh internal control, dan Adopsi PSAK 109 *Good Corporate Governance* OPZIS DIY menyatakan bahwa adopsi PSAK 109 memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Good Corporate Governance* OPZIS DIY.

Untuk variabel kedua yaitu sistem informasi akuntansi, berdasarkan penelitian Rika Ristiawati (2018) dengan judul pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi dan PSAK 109 terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Ridho Gilang Adiko dan Nurul Saniah (2020) dengan judul pengaruh sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Untuk variabel ketiga yaitu pengendalian internal menurut penelitian yang dilakukan Desi Purnama Sari (2019) dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS Pekanbaru menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS Pekanbaru. Sedangkan menurut penelitian Melisha Putri (2018) dengan judul pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan, sistem informasi keuangan dan sistem pengendalian internal

terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri.

Sedangkan variabel keempat yaitu kompetensi amil, berdasarkan penelitian Ratna Wijayanti (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dikarenakan masih banyaknya pegawai dibidang tata usaha yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi yang mana tentu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* serta impikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya beberapa *fenomena gap* dan *research gap* di atas yang terjadi ketidakkonsistenan, maka penulis tertarik untuk mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi tata kelola lembaga zakat yang baik di Kabupaten Pati. Penulis memutuskan melakukan penelitian dengan judul **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH (PSAK 109), SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI AMIL TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA LEMBAGA ZAKAT DI KABUPATEN PATI**".

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati?
2. Apakah terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati?
3. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati?
4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi amil terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati?
5. Apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati?

1.3. TUJUAN

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi amil terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109)), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

1.4. MANFAAT

Berbagai manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi lembaga pengelola zakat sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam hal akuntansi zakat dan tata kelola lembaga zakat sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca sebagai pengetahuan baru, informasi dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis khususnya dalam bidang akuntansi zakat dan tata kelola lembaga zakat, serta sebagai sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan topik penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi standar akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kompetensi amil, dan *good corporate governance*. Selain itu, dalam bab ini juga membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data yang telah dilakukan dengan uji statistik, dan keputusan atas hipotesis yang diajukan, apakah diterima atau ditolak

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Zakat

Secara sederhana pengertian zakat dapat dilihat secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi zakat memiliki makna yaitu *ath-thaharatu* (kesucian, bersih), *al-namaa'* (tumbuh dan berkembang), sebagaimana firman Allah swt dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”¹².

Sedangkan pengertian zakat secara terminologi menurut hukum Islam (*istilah syara'*) zakat merupakan suatu kewajiban atas seluruh harta maupun atas sejumlah harta tertentu bagi suatu kaum tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan¹³. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan satu bagian dari harta seseorang yang mana Allah swt membebani kewajiban bagi pemilik harta tersebut untuk mengeluarkan dari sebagian hartanya dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya dalam waktu yang telah ditentukan yang diikuti dengan adanya syarat-syarat tertentu pula.

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988), hlm. 5.

¹³Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, UNY : Jurnal ilmu Manajemen, Vol 12, No 2, 2015: hlm. 29

Selain dalam Al-Qur'an, zakat juga disebutkan dalam Hadis Riwayat Muslim No. 16 sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوحَدَ اللَّهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ لِاصْبِرْ لِرَمَضَانَ وَالْحَجِّ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “ Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak),: mentauhidkan (mengesakan) Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa ramadhan dan haji”. Seorang laki-laki mengatakan:”Haji dan puasa ramadhan,” maka Ibnu Umar berkata:”Tidak, Puasa Ramadhan dan haji, demikian ini aku telah mendengar dari Rasulullah SAW”.(HR. Muslim, no. (16)-19)¹⁴.

Zakat merupakan hal yang penting dan wajib dilaksanakan bagi seluruh umat islam. Allah akan memberikan balasan pahala kepada mereka yang mengeluarkan zakat dan akan memberikan balasan yang pedih bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat, karena zakat merupakan sebagian harta orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Allah swt berfirman dalam QS At-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآءُكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang

¹⁴Nur Imamah, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Shariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Skripsi Akuntansi Syariah: UIN Walisongo, 2020, hlm. 15.

yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”¹⁵

2.1.2 Manfaat dan Tujuan Zakat

Semua perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt pastilah memiliki manfaat bagi seluruh muslimin dan memiliki tujuan yang jelas. Pelaksanaan zakat sendiri telah jelas memiliki tujuan yang amat mulia. Tujuan dari pelaksanaan zakat yaitu untuk menyebarkan harta agar tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja sehingga tercapai kemashlahatan ummat dan kesejahteraan seluruh ummat. Sebagaimana hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim:

ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اعنيا نهم فتر د الي
فقر ا نهم

Artinya:”*Sesungguhnya Allah telah memfardhukan kepada mereka shadaqah (zakat) atas harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan (diserahkan) untuk orang-orang miskin di antara mereka.*”

Zakat juga memberikan manfaat dan hikmah yang besar bagi pihak pemberi zakat maupun penerima zakat. Manfaat dan hikmah dari pelaksanaan zakat meliputi:

1. Bagi *muzakki* (pemberi zakat), kegiatan mengeluarkan zakat dapat menumbuhkan sikap akhlakul karimah seperti rasa tolong menolong yang tinggi, terhindar dari sifat kikir dan bakhil serta menumbuhkan ketenangan hidup karena telah membersihkan jiwa dan harta melalui pelaksanaan zakat yang merupakan bukti rasa syukur kepada Allah swt¹⁶.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Ruum ayat 39:

¹⁵<https://kalam.sindonews.com/ayat/34/9/at-taubah-ayat-34> diakses pada 6 Juni 2022

¹⁶ Fitri Astria, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas KEUANGAN Lembaga Amil Zakat*, Universitas Bandung, 2015, hlm. 22

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ .

Artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

2. Bagi *mustahik* zakat, zakat dapat bermanfaat untuk menolong, dan membantu dalam rangka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat.
3. Zakat dapat menjadi suatu amal bersama antara si kaya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang sibuk berjihad di jalan Allah mereka terkadang tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga melalui zakat si kaya dapat membantu pemenuhan kebutuhan dari para mujahid¹⁷. Sehingga sama-sama melakukan ibadah dalam rangka menuju keridhaan Allah swt. sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah ayat 273:¹⁸

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْئَلُ النَّاسَ إِذَا سَأَلُوا مِنْهُمْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang

¹⁷ Anik dan Iin Emy Prastiwi, *Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan “Equity”*, STIE AAS Surakarta: Proceeding Seminar Nasional, 2019, hlm.121

¹⁸<https://tafsirweb.com/1039-surat-al-baqarah-ayat-273.html> diakses 20 September 2022

kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.”

4. Zakat dapat dimanfaatkan untuk sumber dana dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi seluruh umat Islam.
5. Zakat juga dapat menjadi salah satu alat untuk pemerataan distribusi pendapatan (antara si kaya dan si miskin).

2.1.3 Syarat-Syarat Zakat

Zakat wajib dikeluarkan bagi orang-prang yang telah memenuhi persyaratan zakat. Persyaratan tersebut harus dipenuhi baik dari sisi wajib zakat maupun harta yang dapat dikeluarkan. Persyaratan ini telah ditetapkan oleh syariat islam. Dalam hal ini persyaratan zakat dibagi menjadi 2, syarat wajib zakat dan syarat sah zakat.

1. Syarat wajib zakat:

a. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat:

1. Merdeka

Orang islam yang berdiri sendiri, bukan budak. Budak tidak dikenakan mengeluarkan zakat dikarenakan pada dasar hukumnya seluruh hartanya merupakan kepunyaan tuannya.

2. Islam

Menurut ijma' zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci¹⁹.

¹⁹ Desi Purnama Sari, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan BAZNAS Pekanbaru*, Skripsi Akuntansi; UIN Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 28

3. Baligh dan berakal

Syarat ini disampaikan oleh Imam Hanafi. Beliau menyampaikan bahwa anak kecil yang belum masuk baligh ataupun orang dalam gangguan jiwa tidak dituntut untuk melaksanakan ibadah. Namun jumhur ulama' fikih berpendapat jika orang dalam gangguan jiwa ataupun anak-anak yang belum baligh mempunyai harta yang cukup sebagai syarat mengeluarkan zakat atau lebih, maka mereka tetap dihukumi wajib untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki dengan alasan bahwa terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tanpa membedakan apakah mereka sudah cukup umur dan berakal sehat atau tidak²⁰. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan tentang kewajiban zakat dibatasi hanya bagi yang sudah baligh ataupun memiliki akal.

b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:

1. Harta yang dimiliki merupakan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, seperti emas, surat berharga, barang temuan, barang tambang, hasil pertanian dan perkebunan, hewan ternak dan barang dagangan
2. Harta tersebut telah mencapai *nisab*
3. Harta tersebut merupakan milik sendiri
4. Harta tersebut telah berjalan satu tahun, atau telah memasuki *haul*
5. Tidak memiliki hutang
6. Harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal dan thoyyib

²⁰ <https://alhikmah.ac.id/syarat-wajib-zakat-dan-harta-yang-wajib-dizakati/> diakses 20 September 2022

7. Harta tersebut dapat berkembang²¹.

2. Syarat sah zakat:

- a. Niat yang diucapkan oleh *muzakki*
- b. Pemindahan kepemilikan harta dari *muzakki* kepada *mustahik*.

2.1.4 Jenis-Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat islam pada bulan suci romadhon. Zakat fitrah dilakeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Zakat fitrah diwajibkan bagi orang muslim yang memiliki kelebihan atas kebutuhan keluarganya. Waktu pelaksanaan zakat fitrah yaitu dari masuk bulan romadhon (tanggal 1 romadhon) sampai sebelum terlaksananya sholat idul fitri.

Para ulama (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, dan ulama lainnya) sepakat mengenai besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan, yaitu 1 *sha'* (2,5 kg) gandum, kurma ataupun jenis lainnya yang merupakan makanan pokok dari daerah tersebut. Dalam hal ini terdapat perbedaan mengenai besaran zakat yang dikeluarkan. Imam hanafi berpendapat bahwa 1 *sha'* senilai dengan 3,8 kg²². Selain makanan pokok, Imam hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah dapat berupa uang tunai yang senilai dengan makanan pokok seberat 1 *sha'*.

²¹ *ibid*

²² Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hlm. 45

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang dimiliki apabila telah mencapai nishab /haulnya dengan tujuan untuk mensucikan harta benda yang dimiliki²³

Dalam perekonomian modern zakat maal dapat berupa:

1. Emas dan perak
2. harta dagangan (barang dagangan)
3. hasil pertanian
4. binatang ternak
5. rikaz (barang temuan atau harta karun)
6. harta *ma'adin* (barang yang ada di dalam bumi) dan hasil laut
7. profesi²⁴

2.1.5 Penerima Zakat

Syarat bagi orang yang berhak menerima zakat dijelaskan secara rinci oleh Allah swt dalam QS At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا لَصَدَقَاتُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”²⁵.

Dari ayat di atas yang berhak menjadi mustahik zakat ada 8 jenis golongan, yaitu:

a. Fakir

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan fakir. Menurut Abu Hanifah fakir adalah orang yang tidak

²³ Hamzah, *Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy*, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, vol 11, 2019, hlm.157

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid iii (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiya, 1987), hlm. 24

²⁵<https://kalam.sindonews.com/ayat/60/9/at-taubah-ayat-60> diakses 3 Juni 2022

mempunyai pendapatan tetap dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan menurut jumbuh ulama fakir adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun pendapatan yang layak untuk memenuhi baik kebutuhan pokok sendiri, ataupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya²⁶ Seseorang dapat dikatakan dalam golongan fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak memiliki mata pencahariaan.

b. Miskin

Sesorang dikatakan termasuk dalam golongan miskin yaitu orang yang telah memiliki harta benda atau mata pencahariaan namun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Amil zakat

Orang yang dipilih oleh seorang pemimpin untuk menjadi petugas dalam kegiatan pengumpulan zakat.

d. Muallaf

Orang yang muncul dalam hatinya keinginan untuk memeluk agama Islam atau mereka yang baru memeluk agama Islam.

e. Budak (*riqab*)

Budak (*riqab*) merupakan orang yang berada dalam tawanan tuannya, dan dapat membebaskan diri dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya tersebut²⁷

f. *Gharim*

Orang yang memiliki tanggungan hutang dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

²⁶Andi Suryadi, *Mustahik dan Harta yang Wajib dizakati Menurut Kajian para Ulama*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin : TAZKIYA , Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol 19, No 1, 2018: hlm. 3

²⁷Malhayatie, *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*, IAIN Lhokseumawe: Jurnal Al- mabhats , Vol 1, No 1, 2016: hlm. 56

g. *Fi sabilillah*

Orang yang berjuang di jalan Allah atau berjihad dalam rangka meninggikan agama Islam.

h. *Ibnu Sabil*

Orang yang dalam kegiatan berpergian jarak jauh yang membutuhkan bekal untuk perjalanannya.

2.1.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Pernyataan standar akuntansi keuangan 109 merupakan pedoman mengenai akuntansi keuangan yang mengatur permasalahan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang dirancang oleh komite akuntansi syariah (KAS) dan telah disahkan pada 18 Oktober 2005. Lahirnya PSAK 109 ini didasari desakan kebutuhan yang semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah yang masih memerlukan penyempurnaan dalam kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah²⁸. Berikut yang perlu dipahami mengenai PSAK 109:

A. Tujuan

PSAK 109 mempunyai tujuan mengatur penerimaan, penyajian, pengukuran, dan pengungkapan atas kegiatan zakat, infak dan sedekah

B. Ruang lingkup

1. PSAK 109 diperuntukan bagi amil yang menerima dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah
2. Orang yang menerima dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dalam hal ini disebut “amil”, adalah organisasi pengelola zakat yang pendiriannya direncanakan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 hanya diterapkan pada entitas syariah yang kegiatan utamanya menghimpun dan

²⁸Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *SAK Syariah (revisi 2020)*, Jakarta: IAI, 2020, hlm. 49

mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah. Entitas syariah yang kegiatan utamanya bukan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah²⁹

C. Pengakuan dan pengukuran

1. Zakat

a. Penerimaan zakat

1. Diakui ketika aset kas maupun aset nonkas diterima
2. Penerimaan zakat dari *muzakki* diakui menjadi penambah dana zakat senilai yang diterima apabila berupa aset kas, namun dana zakat akan diakui senilai harga pasar apabila zakat berupa aset nonkas.
3. Nilai wajar/pasar dari aset nonkas yang diterima ditentukan menurut harga pasar. Apabila tidak terdapat harga pasar atas aset tersebut, maka bisa mengacu pada cara lain dalam menentukan nilai wajar sesuai dengan SAK.
4. Apabila *muzakki* telah menetapkan seseorang menjadi penerima zakat dari amil, maka amil tidak memiliki bagian dari zakat yang diterima tersebut. Namun amil dapat menerima upah dari *muzakki* diluar dana zakat. Upah tersebut lalu dapat diakui sebagai penambah untuk dana amil.
5. Jika terdapat penyusutan nilai aset zakat nonkas, maka penyusutan tersebut dibebankan sesuai dengan sebab terjadinya kerugian tersebut.
6. Pengurangan nilai aset zakat diakui sebagai berikut:

²⁹Dewan Standar Akuntansi Keuangan, *SAK Syariah (revisi 2020)*, Jakarta: IAI, 2020, hlm. 56

- a. Apabila terjadi karena kecerobohan amil, maka diakui sebagai pengurang dana amil
 - b. Apabila terjadi bukan karena kecerobohan amil, maka diakui sebagai pengurang dana zakat³⁰.
- b. Pendistribusian zakat³¹
1. Zakat yang didistribusikan kepada *mustahik*, termasuk amil, dicatat sebagai pengurang dana zakat senilai yang diberikan jika berupa kas. Namun, zakat yang didistribusikan akan dinilai sejumlah yang tertulis apabila berupa aset nonkas
 2. Penetapan besar bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh amil berdasarkan prinsip kewajaran, etika, ketentuan syariah dan ketentuan lainnya
 3. Beban pengumpulan dan pendistribusian zakat didapat dari bagian amil
 4. Bagian dana zakat yang disalurkan bagi amil dicatat menjadi penambah dana amil
 5. Dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk aset tetap diakui sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian zakat seluruhnya apabila didistribusikan untuk secara menyeluruh dijalankan oleh pihak luar tanpa adanya kendali dari amil
 - b. Pendistribusian zakat dengan cara bertahap apabila aset tetap dijalankan pihak luar namun tetap dalam kendali amil.

³⁰<https://www.gustani.id/2019/11/psak-109-akuntansi-zakat-dan.html?m=1> diakses 19 September 2022

³¹ Lidya Aprilia, *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah*, Skripsi Akuntansi: Universitas Sanata Dharma, 2017, hlm. 13-14

2. Infak/Sedekah

a. Penerimaan infak/sedekah

1. Diakui menjadi penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah senilai yang diterima apabila berupa kas. Namun dana infak/sedekah akan dinilai berdasarkan nilai wajar apabila berupa aset nonkas.
2. Nilai wajar/pasar dari aset nonkas yang diterima ditentukan menurut harga pasar. Apabila tidak terdapat harga pasar atas aset tersebut, maka dapat mengacu pada cara lain dalam menentukan nilai wajar sesuai dengan SAK.
3. Infak/sedekah yang diterima bisa berbentuk aset kas maupun aset nonkas. Aset nonkas bisa berupa aset lancar maupun aset tetap.
4. Aset tetap yang diterima dihitung sebesar nilai pasar ketika diterima dan diakui sebagai aset tetap infak/sedekah, penyusutan dari aset tersebut dibebankan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan aset tersebut telah ditetapkan oleh pemberi³².
5. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai berikut:
 - c. Apabila terjadi karena kecerobohan amil, maka dicatat menjadi pengurang dana amil.
 - d. Apabila terjadi bukan karena kecerobohan amil, maka dicatat menjadi pengurang dana infak/sedekah.
6. Dana infak/sedekah sebelum didistribusikan dapat dimanfaatkan sementara agar dapat memperoleh hasil

³²Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi pengelola Zakat*, IAIN Salatiga: Jurnal Muqtasid, Vol 6, No 1, 2015: hlm. 156

yang maksimal dan hasil tersebut diakui sebagai penambah dana infak/sedekah³³.

b. Pendistribusian infak/sedekah

1. Didistribusikan kepada *mustahik*, termasuk amil, dicatat menjadi pengurang dana infak/sedekah senilai yang diberikan jika berupa kas. Namun, infak/sedekah yang didistribusikan akan dinilai sejumlah yang tertulis apabila berupa aset nonkas.
2. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil dicatat sebagai penambah dana amil.
3. Penetapan besar bagian untuk penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil berdasarkan prinsip kewajaran, etika, ketentuan syariah dan ketentuan lainnya.
4. Infak/sedekah yang dibagikan amil kepada amil lain dan amil tersebut tidak akan mendapatkan kembali dana yang diberikan tersebut, maka akan dicatat menjadi pengurang dana infak/sedekah³⁴
5. Pendistribusian dana infak/sedekah kepada penerima terakhir dalam bagan dana berputar diakui menjadi piutang infak/sedekah bergulir dan tidak menjadi pengurang dana infak/sedekah

D. Penyajian

Amil melaporkan dana zakat, infak dan sedekah serta dana amil secara tersendiri pada laporan neraca keuangan.

³³ <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/ Pernyataan-sas-72-psak-109-akuntansi-zakat-dan-infak-sedekah/>

³⁴Ibid, hlm. 157

E. Pengungkapan

1. Zakat

a. Amil menyampaikan poin-poin yang berhubungan dengan kegiatan zakat, namun tidak terbatas pada³⁵:

1. pedoman pendistribusian zakat, meliputi penetapan skala prioritas pendistribusian zakat dan penerima zakat selain amil
2. pedoman pendistribusian zakat bagi penerima zakat bukan amil dan amil meliputi penetapan bagian tiap golongan penerima zakat, alasan, dan koherensi keputusan amil.
3. cara penetapan harga pasar yang diterapkan untuk penerimaan zakat aset bukan kas.
4. uraian total pendistribusian zakat pada setiap mustahik
5. jika terdapat pemakaian dana zakat berupa aset tetap yang masih dalam kendali amil atau pihak luar yang dikendalikan amil maka diterangkan mengenai total dan persentase atas seluruh pendistribusian zakat beserta alasannya
6. interaksi antar bagian yang berhubungan antara amil dan mustahik yang berupa sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang didistribusikan serta pembagian dari tiap-tiap aset yang didistribusikan tersebut dari keseluruhan pendistribusian zakat pada periode tersebut.

2. Infak/sedekah

a. Amil menyampaikan poin-poin berikut berhubungan dengan kegiatan infak/sedeah, namun tidak terbatas pada³⁶:

1. kebijakan pendistribusian zakat, seperti penetapan skala prioritas pendistribusian zakat dan mustahik nonamil

³⁵<https://staff.blog.ui.ac.id/files/ED-PSAK-109.pdf> diakses 19 September 2022

³⁶ <https://www.gustani.id/2019/11/psak-109-akuntansi-zakat-dan.html?m=1> diakses 19 September 2022

2. kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan koherensi kebijakan
3. cara penetapan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat aset nonkas
4. kehadiran dana infak/sedekah yang tidak langsung didistribusikan akan tetapi terlebih dahulu dikelola, jika ada, diungkapkan total dan persentase dari keseluruhan penerimaan infak/sedekah beserta alasannya pada periode pelaporan tersebut
5. hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada poin 4 dinyatakan secara terpisah
6. pemakaian dana infak/sedekah berupa aset kelolaan, jika ada, disampaikan jumlah dan persentase atas keseluruhan pemakaian dana infak/sedekah beserta alasannya
7. uraian dana infak/sedekah didasarkan atas tujuan pendistribusiannya, terikat dan tidak terikat
8. interaksi antar bagian yang berhubungan antara amil dan mustahik yang berupa sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang didistribusikan serta persentase dari tiap-tiap aset yang didistribusikan tersebut dari keseluruhan pendistribusian zakat pada periode tersebut.³⁷

2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 kata yaitu sistem, informasi, dan akuntansi. Menurut I Cenik Ardana dan Hendro Lukman dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, dijelaskan bahwa sistem berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan menjadi 3 poin sebagai berikut:³⁸

³⁷<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-72-psak-109-akuntansi-zakat-dan-infak-sedekah> diakses 6 Mei 2022

³⁸I Cenik Ardana DAN Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 13

- a. Sekelompok bagian yang saling bekerja sama dalam mengerjakan suatu tujuan
- b. Sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang ditata dan diatur secara baik
- c. Cara atau metode yang rapi dan teratur untuk mengerjakan suatu hal.

Sedangkan menurut Zaki Baridwan, sistem merupakan suatu kesatuan yang tersusun dari beberapa bagian yang saling berhubungan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu³⁹. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Sistem merupakan sekumpulan dua atau lebih bagian atau unsur yang saling bersatu dan berkorelasi untuk meraih tujuan tertentu.

George H. Bodnar mendefinisikan informasi sebagai suatu data yang diolah dan memiliki manfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang sesuai⁴⁰. Sedangkan menurut Wijayanto informasi merupakan suatu fondasi dan sistem kontrol, artinya informasi mampu menyampaikan sesuatu yang benar dan secara tepat waktu yang semuanya berasal dari fakta yang selanjutnya dapat diolah dan menghasilkan output yang berguna bagi penggunanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Informasi merupakan sekumpulan data faktual yang diproses dan diolah menjadi sebuah susunan yang berarti bagi pembacanya dan berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengelompokkan, meringkas lalu dianalisa yang akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang berhubungan dengan transaksi keuangan⁴¹. Sehingga

³⁹Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 22

⁴⁰George H. Bodnar, *Sistem Informasi Akuntansi (edisi 9)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 43

⁴¹ Siti Maria Wardayati, *Pengantar Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Koperasi*, (Malang: Selaras Media, 2016) hlm. 1

dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah serangkaian sistem yang dibentuk untuk memproses data mulai dari mencatat, mengelompokkan, meringkas dan mengolah data yang mampu memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang berfungsi membantu proses merencanakan, mengendalikan, mengoperasikan dan penetapan kebijakan dari suatu bisnis dan perusahaan.

Sistem informasi akuntansi diciptakan untuk mempermudah proses pengolahan data. Sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan karena pada era modern seperti sekarang membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan informasi secara efektif, efisien, cepat dan akurat. Tujuan dan manfaat dengan adanya sistem informasi akuntansi adalah:⁴²

1. Mengevaluasi aset perusahaan
2. Menghasilkan bermacam informasi yang berfungsi dalam penetapan kebijakan
3. Memberikan informasi kepada pihak luar perusahaan
4. Menyediakan informasi bagi penilaian performa pegawai
5. Memberikan informasi tahun lalu untuk keperluan pemeriksaan
6. Memberikan informasi untuk pembentukan dan penilaian anggaran perusahaan
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengendalian internal perusahaan.

Kualitas sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. Efisiensi
2. Informasi yang diberikan akurat dan terkini terhadap catatan perusahaan

⁴² Mutiara Kun Arifah, *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan PSAK No. 109 pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru*, Skripsi Akuntansi: UIN SUSKA RIAU, 2019, hlm.16-17

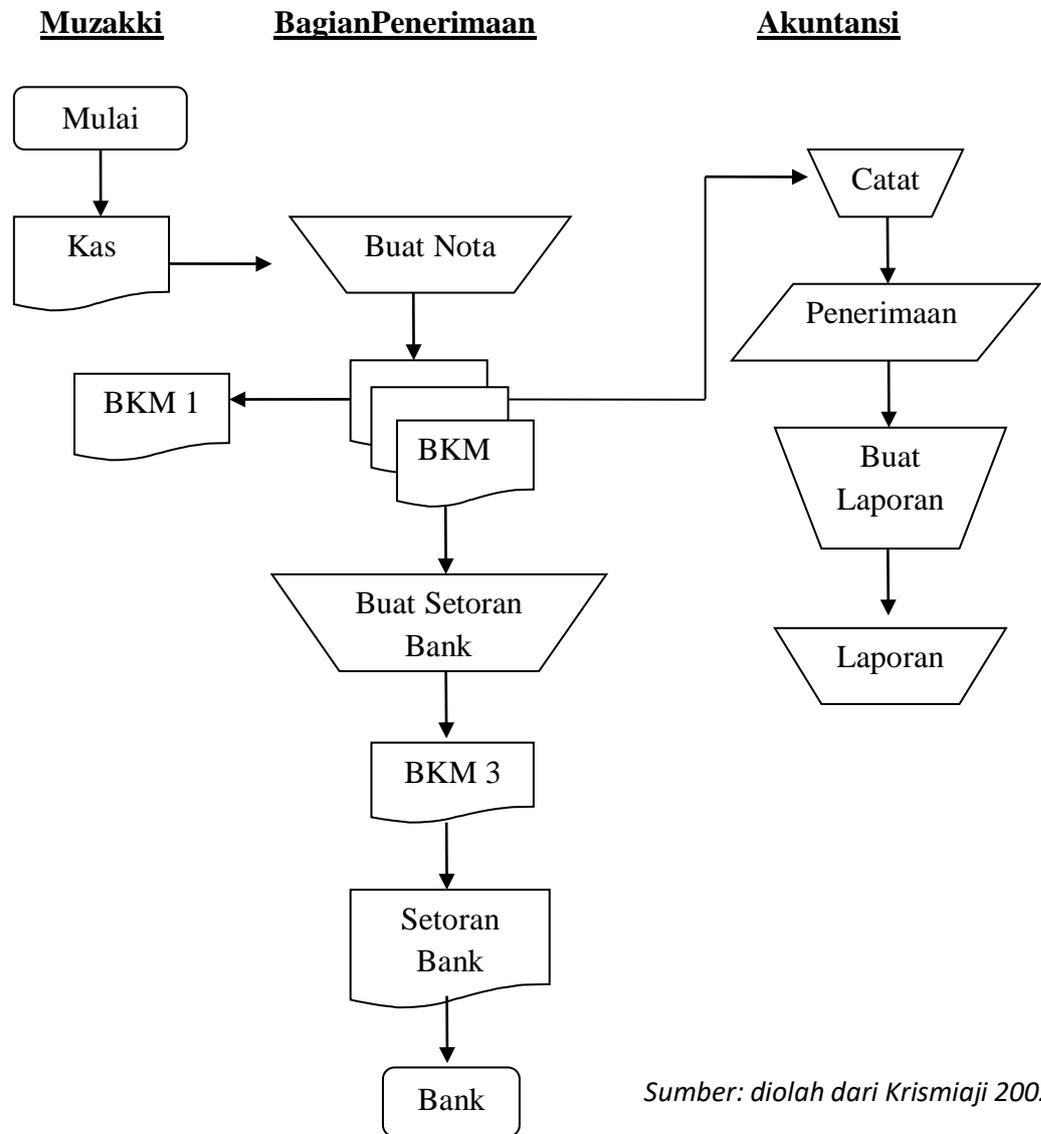
3. Pelayanan dari Sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan produk dan kualitas jasa
4. Sistem yang mudah dan andal dalam perencanaan dan penyusunan anggaran serta pengendalian⁴³.

Organisasi pengelola zakat didesak untuk mampu menyampaikan informasi keuangan yang cepat, akurat. Sehingga dalam organisasi pengelola zakat sangat dibutuhkan sistem informasi akuntansi dalam membantu untuk menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Dalam organisasi pengelola zakat terdapat 5 jenis laporan yang harus dibuat yaitu; laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan⁴⁴. Berikut bagan alir sistem informasi akuntansi dalam organisasi pengelola zakat agar dapat menghasilkan informasi laporan keuangan:

⁴³Atyanto Mahatmyo, *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 13

⁴⁴ Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 203-205

Gambar 2.1 Prosedur Penerimaan ZIS



Sumber: diolah dari Krismiaji 2002

Sistem informasi akuntansi menurut pandangan islam diterangkan dalam QS. Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَلَيْسَ لَكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّيْسَ لَهُ الْغَايِبُ

Artinya : “(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang

telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat”.

Makna dari diciptakannya sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi adalah bagaimana seorang akuntan dapat mengolah informasi akuntansi dengan kecanggihan teknologi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna informasi untuk memahami. QS Az-Zumar ayat 18 diatas menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan memilah informasi yang didapat, menimbang terlebih dahulu antara informasi yang baik dan buruk. Orang yang berilmu akan menyebarkan informasi yang baik, bermanfaat dan memudahkan orang dalam memahami informasi tersebut. Dalam ayat diatas dapat dimaknai bahwa sistem informasi akuntansi yang bermanfaat yaitu yang mampu memberikan informasi akuntansi yang kredibel, lengkap, relevan, mudah dimengerti dan diperoleh dengan mudah, tepat waktu, dan dapat diverifikasi harus dipilah terlebih dulu informasinya menghasilkan suatu kebaikan atau keburukan bagi kehidupan manusia⁴⁵.

2.1.8 Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) yang melingkupi Badan Amil Zakat Nasional disebutkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses terstruktur pada perilaku dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan, manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan kepercayaan yang memuaskan atas tujuan organisasi yang telah diraih melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kecakapan dalam hal pelaporan keuangan, perlindungan aset negara dari kegiatan korupsi, dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku⁴⁶. Organisasi

⁴⁵Rendy Mirwan Aspirandi, *Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi dalam Ilmu Islam Review of Accounting Information System on Islamic Science*, (Universitas Muhammadiyah Jember: Prosiding 4th Seminar Nasional dan Call for Papers Fakultas Ekonomi, 2018), hlm. 301

⁴⁶Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 94

pengelola zakat perlu untuk menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, maka masyarakat sebagai stakeholder utama bagi organisasi pengelola zakat dapat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap organisasi pengelola zakat tersebut. Sehingga dengan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maka distribusi zakat juga akan meningkat.

Untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, organisasi pengelola zakat memerlukan instrumen pengendalian internal, diantaranya:

1. Prosedur organisasi standar (POS)
2. Sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*)
3. Partisipasi perencanaan yang terdokumentasi
4. Sistem informasi satuan kinerja individu dan unit⁴⁷.

Dalam organisasi pengelola zakat, kegiatan pengendalian internal meliputi 5 kegiatan utama:⁴⁸

1. Sistem evaluasi kinerja

Sistem evaluasi kinerja diperlukan untuk mengendalikan tingkah laku semua pegawai di organisasi pengelola zakat. Aktivitas pengendalian untuk sistem evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. setiap pegawai wajib mengisi daftar hadir
- b. setiap pegawai di awal tahun kerja wajib menyampaikan parameter-parameter yang akan dijalankan
- c. Melakukan rapat evaluasi manajemen sekaligus menentukan hasilnya.

2. Pengolahan informasi

Pengolahan informasi yang baik dan benar dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Pengolahan

⁴⁷*ibid*, hlm. 97

⁴⁸ Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 98

informasi dalam organisasi pengelola zakat meliputi 2 hal, pengolahan informasi keuangan dan pengolahan informasi non keuangan. Dalam hal pengolahan informasi keuangan dikelola oleh pihak akuntansi, lalu diserahkan ke pihak auditor yang selanjutnya akan dilaporkan kepada pihak manajemen. Sementara untuk pengolahan informasi nonkeuangan akan secara langsung dilaporkan ke pihak manajemen. Untuk mendukung terciptanya pengolahan informasi yang akurat, efektif dan efisien maka diperlukan alat pendukung yang dapat diakses secara mudah, cepat dan tepat.

3. Pengendalian aset

Selain pengendalian terhadap kinerja pegawai dan pengolahan informasi, diperlukan juga pengendalian terhadap aset yang dimiliki oleh organisasi pengelola zakat baik fisik maupun nonfisik. Pengendalian fisik dan nonfisik terhadap barang-barang ini dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa aturan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Seluruh pegawai dilarang membawa keluar barang milik OPZ jika tidak ada izin tertulis dari pimpinan
- b. Seluruh pegawai dilarang menggunakan barang milik OPZ untuk keperluan pribadi
- c. Aset yang bersifat fisik seharusnya diasuransikan
- d. Aset yang bersifat nonfisik harus dicek secara rutin.

4. Pengendalian penyaluran dana

Pengendalian dalam proses penyaluran dana dilakukan dengan menerapkan beberapa poin dibawah ini:

- a. Terdapat nomor khusus yang dicetak dalam dokumen
- b. Terdapat pembagian tugas atas beberapa kegiatan di OPZ
- c. Terdapat proses pemeriksaan secara bertingkat dari proses awal sampai akhir kegiatan penyaluran dana

⁴⁹ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi Perencanaan, Proses, dan Penerapan*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011), hlm. 3-4

5. Pengendalian pengumpulan dana

Pengendalian pengumpulan dana dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, muzakki mendatangi OPZ dan diterima oleh bagain penerima zakat yang selanjutnya setelah transaksi pihak muzakki menerima berita acara atau bukti transaksi pengumpulan zakat. Untuk pengumpulan zakat secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara muzakki membuka rekening di bank syariah, sehingga setiap transaksi secara otomatis akan terdeteksi dan otomatis terjurnal dalam SIA OPZ⁵⁰.

Pengendalian internal dalam perspektif islam dijelaskan dalam QS. Al-Baqoroh ayat 282 yang artinya:

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penullis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah

⁵⁰ Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 100

memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁵¹

Ayat di atas berisis tentang cara memelihara hak keuangan masyarakat. Dalam ayat tersebut diajarkan bagaimana cara melakukan transaksi jual beli ataupun utang pitang yang yang benar sesuai syariat Islam agar tidak terjerumus pada kezaliman dan kesalahan pada semua pihak yang terlibat. Dari penjelasan sistem pengendalian internal dan penjelasan QS Al-Baqoroh ayat 282 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya memiliki makna yang selaras. Pengendalian internal merupakan suatu tindakan pencegahan pada suatu organisasi dari tindak kekeliruan dan kecurangan dari berbagai pihak. QS Al-Baqoroh ayat 282 mengandung makna tentang kehati-hatian dalam melakukan transaksi agar terhindar dari kekeliruan.

2.1.9 Kompetensi Amil

Kompetensi berasal dari kata “*competency*” yang berarti suatu kecakapan, kemampuan, kompetensi, dan wewenang. Menurut Stephen Robbins, kompetensi merupakan suatu kemampuan, kapabilitas, dan kapasitas seseorang dalam mengerjakan suatu tugas dalam pekerjaannya yang didasari pada kecerdasan otak dan kemampuan fisik⁵². Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria yang dibutuhkan saat mengemban suatu jabatan tertentu⁵³. Dapat ditarik kesimpulan, Kompetensi adalah keahlian dasar, kemampuan, kapabilitas dan kualitas kerja yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat terlaksana secara maksimal.

Amil merupakan orang yang bertugas mengelola harta dan pelaksanaan zakat dari proses pengumpulan, pencatatan, penyimpanan maupun pendistribusian zakat tersebut. Manusia memegang peranan

⁵¹<https://kalam.sindonews.com/ayat/282/2/al-baqarah-ayat-282> diakses pada 6 juni 2022

⁵²S.P Robbins, *Perilaku Organisasi*,(Indonesia: PT Macanan Jaya, 2007). hlm. 35

⁵³Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat*, IAIN Tulungagung: el Barka, vol 3, 2020, hlm.117

penting dalam setiap aktivitas kehidupan. Teknologi secanggih apapun akan sia-sia tanpa adanya peran manusia. Indikator keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, dalam hal ini amil pada organisasi pengelola zakat sangat berpengaruh pada terciptanya pengelolaan organisasi yang baik dan pengelolaan zakat yang tepat. Menurut Nana Minarti Direktur Pemberdayaan Baznas RI, terdapat 4 kemampuan yang harus dimiliki selaku amil zakat, diantaranya yaitu: Pengetahuan mengenai fikih zakat, kemampuan manajerial, kemampuan pendayagunaan dan kemampuan penghimpunan dana⁵⁴.

Terdapat beberapa karakteristik kompetensi sumber daya manusia yang baik:

- a. Pengetahuan (*knowledge*) adalah keahlian seorang amil atas pengetahuan pada bagian yang digeluti
- b. Kemampuan (*skill*) adalah keahlian seorang amil untuk melaksanakan tugas
- c. Motivasi (*motive*) adalah suatu ketetapan yang diciptakan dan dipikirkan yang dikeluarkan dalam suatu perilaku
- d. Sifat (*traits*) adalah kepribadian fisik atau respon-respon yang muncul atas suatu ketetapan terhadap kondisi dan informasi
- e. Konsep diri (*self concept*) adalah suatu hal yang berhubungan dengan nilai luhur yang dimuliakan seseorang atau suatu sikap yang ideal yang diinginkan untuk dipraktikkan dalam kehidupannya dan pekerjaannya⁵⁵.

Majelis ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 mengenai amil zakat dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Pengertian amil zakat

⁵⁴www.Republika.co.id-Khanza diakses 20 Agustus 2022

⁵⁵Nur Imamah, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Shariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat*, Skripsi Akuntansi Syariah: UIN Walisongo, 2020, hlm. 36

1. Seseorang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat, dan atau
 2. Seseorang yang dibuat dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri dan dilegalkan oleh pemerintah untuk mengelola kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat.
- b. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang amil zakat:
1. Islam
 2. Memiliki akal sehat dan sudah baligh
 3. Memiliki sifat dapat dipercaya
 4. Mempunyai ilmu yang memadai mengenai ketentuan pelaksanaan zakat dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai amil zakat
- c. Tugas amil zakat:
1. Melakukan kegiatan penghimpunan zakat yang terdiri dari pencatatan wajib zakat, penetapan objek wajib zakat, nishab zakat, dan syarat-syarat tertentu terhadap tiap-tiap objek wajib zakat
 2. Pendayagunaan zakat yang terdiri dari pendataan aset, peawatan, dan penjagaan aset zakat
 3. Penyaluran zakat yang terdiri dari pendistribusian dana zakat kepada mustahik zakat dan memastikan sampai pada mustahik dengan baik dan benar, serta pelaporannya
- d. Beban operasional pengelolaan zakat pada dasarnya disiapkan oleh pemerintah
- e. Jika biaya untuk operasional tidak disiapkan pemerintah, atau disiapkan tapi masih kurang, maka beban operasional pengelolaan zakat dapat menggunakan dana zakat bagian amil dan fi sabilillah ataupun dana diluar zakat yang masih dalam batas kewajaran
- f. Aktivitas menumbuhkan pemahaman mengeluarkan zakat bisa diambilkan dari dana zakat bagian amil atau fi sabilillah yang masih pada batas wajar, peoporsional dan berdasarkan aturan islam

- g. Dana zakat bagian amil hanya diperuntukkan bagi amil yang tidak mendapatkan upah dari pemerintah ataupun organisasi nonpemerintah sebagai balas tanda jasa sesuai dengan batas kewajaran. Untuk amil zakat yang sudah mendapatkan upah dari pemerintah atau organisasi nonpemerintah tidak diperkenankan mendapat dana zakat untuk bagian amil.
- h. Amil tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah dari muzakki dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil, sebaliknya amil juga tidak diperbolehkan memberikan hadiah kepada muzakki dari dana zakat⁵⁶

2.1.10 *Good Corporate Governance*

Good corporate governance atau *good governance* secara etimologi tersusun atas 2 kata yaitu *good* yang menurut kamus *oxford* berarti baik, bermanfaat, kompeten, dan bermanfaat, sedangkan *governance* menurut *webster dictionary* merupakan kata yang erasal dari kata *go govern* yang berarti mengontrol, memerintah, dan mengarahkan⁵⁷. Secara terminologi *world bank* mendefinisikan *good corporate governance* adalah suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang kompak dan bertanggung jawab yang selaras dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, melaksanakan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and political framework* bagi pertumbuhan kegiatan usaha yang dijalankan⁵⁸. Pengertian tersebut sejalan dengan firman Allah swt dalam QS As Saff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

⁵⁶<http://mui.or.id>fatwa>No.-08-Amil-Zakat.pdf> diakses 17 Mei 2022 jam 04.26)

⁵⁷Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), hlm. 65.

⁵⁸<https://www.worldbank.org> diakses 28 juni 2022

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh* ”⁵⁹

Dengan terlaksananya *good corporate governance*, maka hubungan antara pengelola perusahaan dengan *stakeholder* dapat bersinergi dengan baik. Dalam hal ini pada organisasi pengelola zakat maka hubungan muzakki dengan amil dapat bersinergi dengan baik dan akan tumbuh keyakinan serta kepercayaan muzakki kepada amil pada kegiatan pengelolaan zakat.

Pelaksanaan *good corporate governance* merupakan hal yang penting. Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:5-6), *Good Corporate Governance* memiliki 5 tujuan utama, yaitu:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan, serta
5. Meningkatkan kualitas sinergi antara *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Selain memiliki 5 tujuan utama diatas, pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga memiliki manfaat yang besar terhadap suatu organisasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Memperbaiki dalam hal komunikasi
2. Meminimalisir kemungkinan terjadinya perselisihan
3. Dapat fokus pada strategi-strategi tertentu
4. Dapat meningkatkan produktivitas organisasi dan terciptanya efisiensi
5. Kestinambungan manfaat

⁵⁹<https://tafsirweb.com/10876-surat-as-shaff-ayat-4.html> diakses 5 juni 2022

6. Dapat memperbaiki sekaligus mempromosikan citra perusahaan
7. Meningkatkan kepuasan *stakeholder*
8. Mengukur kinerja target perusahaan⁶⁰.

Terdapat 5 prinsip dalam *Good Corporate Governance*, sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar saling keterbukaan dan kebebasan dalam memperoleh informasi yang berkaitan secara langsung kepada publik⁶¹. adalah keterbukaan informasi, kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan, dan dapat dengan mudah dipahami. Transparansi dapat tercipta apabila seluruh informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik dapat diperoleh secara langsung, mudah, dan cepat oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam islam indikator transparansi terdiri atas 3 hal utama:

- a. Organisasi atau perusahaan bersifat terbuka kepada *stakeholder*
- b. Informasi disampaikan apa adanya, relevan, dan tepat waktu serta bisa dipadankan dengan informasi yang lainnya
- c. Informasi disampaikan kepada seluruh *stakeholder* dan pihak yang berkepentingan lainnya secara adil⁶².

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam suatu organisasi harus memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dalam organisasi pengelola zakat, maka amil harus dapat menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

⁶⁰Zulhidayatul Arbi, *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak*, Skripsi Akuntansi: UIN SUSKA RIAU, 2020, hlm. 16-17

⁶¹Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), hlm. 69

⁶²A. M. Abu Tapanjeh, *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles*. Critical Perspective on Journal: Accounting, 2009, hlm. 105-177

pelaksanaannya kepada muzakki. Terdapat beberapa dimensi yang harus dipenuhi dalam menerapkan akuntabilitas publik dalam suatu organisasi sektor publik:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)
 - b. Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*)
 - c. Akuntabilitas program (*program accountability*)
 - d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)
 - e. Akuntabilitas finansial (*financial accountability*)⁶³.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai situasi dimana manajemen organisasi melakukan pengelolaan organisasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memenuhi tanggungjawab kepada seluruh *stakeholder*. Prinsip pertanggungjawaban dalam islam merupakan output dari sifat amanah seseorang, sehingga pelaksanaannya dalam organisasi pengelola zakat termasuk unsur yang sangat penting. Dalam organisasi pengelola zakat, amil bertugas sebagai orang yang dipercaya muzakki untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat sesuai dengan ketentuan kepada mustahik zakat. Apabila amil bertindak menyeleweng dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka kepercayaan muzakki akan hilang, maka sifat amanah ini hilang dan prinsip pertanggungjawaban dalam organisasi pengelola zakat tidak akan dapat terwujud.

Indikator suatu organisasi menerapkan pertanggungjawaban secara efektif diantaranya:

- a. Mempertimbangkan tanggung jawab sosial
- b. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan
- c. Menjadi profesional dan memenuhi etika

⁶³Bayu Dharmaga Alkahfi, Tufiq Tufiq, dan Inten Meutia, *Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 4, 2020, hlm. 117

d. Lingkungan bisnis yang baik⁶⁴

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian berarti suatu kondisi dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun maupun kepentingan individu yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Dalam penerapan prinsip kemandirian ini manajemen organisasi dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa adanya intervensi dari satu pihak penguasa lainnya. Organisasi dikelola secara mandiri, profesional dan tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang menyeleweng dari aturan organisasi yang berlaku. Apabila pengendalian internal pada suatu organisasi berjalan efektif, maka prinsip kewajaran ini dapat terwujud.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran berarti kesetaraan dan perlakuan adil terhadap seluruh *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam prinsip kewajaran ini, pihak manajemen dituntut untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi dan kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu manajemen organisasi juga harus memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk dapat menyampaikan masukan dan saran untuk kepentingan organisasi.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

N o	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dariana dan	Pengaruh	Variabel	Dalam	Hasil

⁶⁴Mappasele 2013 halaman 33

	Ruzita (2019)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	independen : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (X1) Variabel dependen: <i>Good Corporate Governance</i> (Y)	penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana	membuktikan bahwa Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 berpengaruh positif terhadap Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis.
2.	Sulastiningsih (2019)	Analisis Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , <i>Internal Control</i> , Dan Adopsi PSAK 109 Terhadap Kinerja OPZIS DIY Melalui Metode <i>Balance</i>	Variabel independen : <i>Corporate Governance</i> (X1), <i>Internal Control</i> (X2), Dan PSAK 109 (X3) Variabel dependen: Kinerja <i>Balance</i>	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan Uji	Hasil membuktikan bahwa: <i>Corporate Governance</i> (X1) memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kinerja OPZIS. <i>Internal Control</i> (X2) memiliki

		<i>Scorecard</i>	<i>Scorecard</i> (Y)	Stimulan.	hubungan negatif tidak signifikan terhadap kinerja OPZIS. PSAK 109 (X3) Memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja OPZIS.
3.	Rika Ristiawati (2018)	pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi dan pedoman standar akuntansi 109 terhadap peningkatan akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS	Variabel independen: implementasi sistem informasi akuntansi dan pedoman standar akuntansi 109. Variabel dependen: akuntabilitas	Dalam Penelitian ini menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dengan pendekatan eksplanasi sekuensial.	Penerapan sistem informasi akuntansi dan PSAK 109 memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

		Kabupaten Sumedang			
4.	Desi Purnama Sari (2019)	Pengaruh penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan (studi empiris pada badan amil zakat nasional di pekanbaru)	Variabel independen: standar akuntansi zakat, transparansi dan sistem pengendalian intern Variabel dependen: akuntabilitas keuangan	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan Uji Stimulan. Populasi 45, sampel 32, purposive ampling	mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan
5.	Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi (2018)	Efektivitas Pengendalian Internal, dan sumber daya manusia terhadap implementasi good	Variabel independen: Pengendalian Internal, dan sumber daya manusia Variabel dependen:	Teknik analisis data: analisis kuantitatif, dengan model SEM (Structural Equation Modelling),	mengungkapkan bahwa pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif

		corporate governance serta impikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten tangerang	good corporate governance	sampel 150 responden.	terhadap implementasi <i>Good Corporate Governance.</i>
--	--	--	---------------------------------	--------------------------	---

Berdasarkan tabel rangkuman penelitian terdahulu yang telah disajikan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

- a. Penelitian ini fokus pada *good corporate governance* secara keseluruhan, bukan hanya salah satu prinsip dari *good corporate governance*.
- b. Pada penelitian ini, peneliti menambah variabel independen berupa pengendalian internal dan kompetensi amil sebagai bagian dari faktor pengaruh *good corporate governance*.
- c. Pada penelitian ini, objek yang diteliti berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah disajikan diatas. Objek penelitian ini yaitu pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

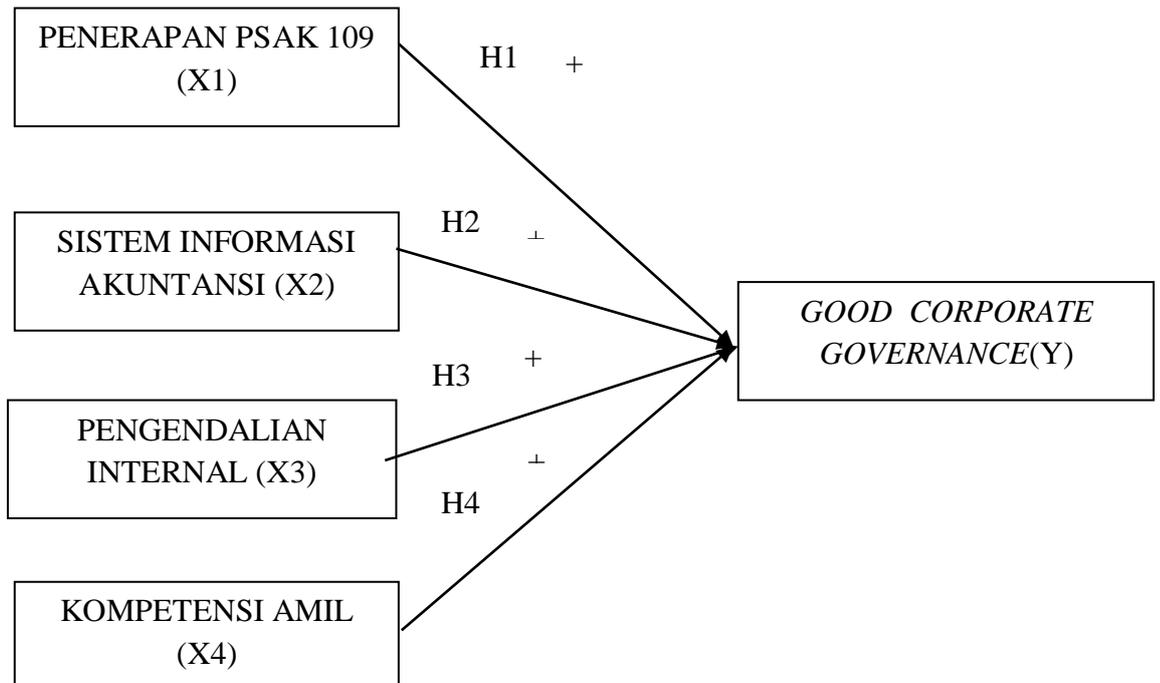
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting⁶⁵. Dengan demikian kerangka berpikir merupakan landasan dari sebuah pemahaman yang mendasar dan sebagai pondasi bagi setiap pemikiran atas penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dibuat kerangka berpikir yaitu untuk memudahkan pemahaman dalam penganalisaan antar variabel

⁶⁵Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), hlm. 88

penelitian. Berikut kerangka berpikir yang tersusun dari penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian



2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hipotesis berasal dari kata hipo (*hypo*) yang berarti kurang daripada tesis (*thesis*) yang berarti pendapat⁶⁶. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat yang sifatnya belum final, belum dapat dikatakan sebagai suatu tesis. Hipotesis bersifat sebagai dugaan sementara atau jawaban sementara atas suatu masalah. Sedangkan pengembangan hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara dari suatu masalah yang dirumuskan, karena jawaban yang dibagikan tersebut berdasarkan dari suatu teori yang berkesinambungan, belum berdasarkan fakta-fakta berdasarkan uji coba yang diperoleh melalui

⁶⁶Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 67

pendistribusian data-data⁶⁷. Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap *Good Corporate Governance*

Penggunaan pedoman standar akuntansi keuangan dalam lembaga atau organisasi sangat penting, termasuk pada organisasi pengelola zakat. Penerapan akuntansi zakat sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja suatu lembaga. Akuntansi zakat memiliki tujuan untuk membimbing kepada informasi yang mengharuskan pihak manajemen zakat untuk memberikan laporan mengenai tanggung jawab dalam melaksanakan dan melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien mengenai program dan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah yang mana semua ini merupakan tanggung jawab dan wewenang pihak manajemen zakat dan mengharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak eksternal lembaga zakat⁶⁸. Dengan menerapkan standar akuntansi maka dapat mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Dariana dan Ruzita pada tahun 2019 membuktikan bahwa penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 berpengaruh positif terhadap implementasi *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 = Penerapan PSAK 109 berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*

⁶⁷Ika Sanjaya, *Pengaruh Syariah Compien, Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru*, Skripsi Akuntansi; UIN SUSKA Riau, 2019, hlm 54

⁶⁸Desi Purnama Sari, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan BAZNAS Pekanbaru*, Skripsi Akuntansi; UIN Syarif Kasim Riau, 2019, hlm.41

2. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *Good Corporate Governance*

Sistem informasi akuntansi dibuat atas dasar kebutuhan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah dan menganalisa data keuangan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pada umumnya sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem akuntansi yang telah terkomputerisasi. Tujuan disusunnya sistem informasi akuntansi adalah pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen, kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rika Ristiawati pada tahun 2018 membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Sumedang. Akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip *Good Corporate Governance* yang mana semakin baik akuntabilitas laporan keuangan lembaga zakat, maka *Good Corporate Governance* pada lembaga zakat tersebut juga dapat diartikan berjalan dengan baik.

Maka dari itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 = Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*

3. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*

Pengendalian internal menurut hery ydalam karya tulis marseli adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan

sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan⁶⁹. Pengendalian internal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap adanya tindakan kecurangan. Semakin baik pengendalian internal suatu organisasi atau lembaga maka semakin sempit pula kesempatan terjadinya kecurangan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Desi Purnama Sari pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* dimana semakin baik akuntabilitas laporan keuangan lembaga zakat. Maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* pada lembaga zakat tersebut dapat terwujud dengan adanya akuntabilitas yang baik, dan akuntabilitas yang baik dapat terwujud apabila menerapkan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif.

Untuk itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 = Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*

4. Pengaruh kompetensi amil terhadap *Good Corporate Governance*

Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam suatu organisasi atau lembaga. Meskipun telah muncul teknologi yang semakin canggih, namun tetap memerlukan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya sehingga keberadaan sumber daya manusia tidak bisa tergantikan. Dengan demikian kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia sangat penting dalam kaitannya melaksanakan pekerjaannya. Tujuan organisasi akan tercapai apabila pegawai

⁶⁹Jeni rahman dan evi martaseli, *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten Sukabumi*, hal.. 178 Jurnal ilmiah ilmu ekonomi, 2018, vol 6, hlm. 178.

memiliki kemampuan yang memadai dan melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas kerja karyawan dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, perbaikan keterampilan, dan pembinaan sikap terhadap pekerjaan serta tugas-tugasnya⁷⁰

Menurut penelitian yang telah dilakukan Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi tahun 2018 mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap implementasi *Good Corporate Governance*. Kompetensi sumber daya manusia yang baik dapat menciptakan suatu lembaga yang patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan maupun Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian dapat menciptakan *Good Corporate Governance* pada suatu lembaga.

Untuk itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 = Kompetensi amil berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*

5. Pengaruh PSAK 109, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Amil terhadap *Good Corporate Governance*

Berdasarkan dari pemaparan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil berpengaruh terhadap *good corporate governance*. Dengan adanya penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, penggunaan sistem informasi akuntansi, pelaksanaan pengendalian internal yang tepat dan didukung dengan kompetensi amil yang baik maka dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan terhindar dari segala macam penyelewengan dalam pengelolaan dana zakat.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Rika Ristiawati tahun 2018 mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan PSAK 109 memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan

⁷⁰Fatahullah Jurdi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Pengelolaan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing*, (Malang:Intrans Publishing, 2018), hlm. 111

pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Sumedang. Selain itu penelitian yang telah dilakukan Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi tahun 2018 mengungkapkan bahwa pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap implementasi *Good Corporate Governance*.

Untuk itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5 = Penerapan PSAK 109, Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Amil secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 JENIS DAN SUMBER DATA

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menganalisis data yang berupa angka dengan menggunakan statistik dan terstruktur⁷¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari pihak pertama secara langsung tanpa adanya perantara. Dalam hal ini data primer diperoleh dari pegawai atau amil zakat di Organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Pati. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah tersedia sebelumnya yang berasal dari pihak kedua dan ketiga. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, data dukung atau laporan keuangan dan sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3.2 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung melalui lisan terhadap responden penelitian⁷². Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap amil organisasi pengelola zakat yang merupakan objek penelitian.

⁷¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 38

⁷²Agustinus Supratiknya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi*, (Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta, 2015), hlm. 53

b. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya⁷³.

Dalam teknik pengumpulan data melalui kuesioner, peneliti mengambil 8 responden pada setiap organisasi pengelola zakat yang terdiri dari 5 organisasi pengelola zakat.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah cakupan secara umum yang terdiri dai subjek atau objek yang memenuhi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari dan diambil kesimpulannya⁷⁴. Populasi pada penelitian ini yang menjadi cakupan objek yang akan diteliti yaitu 5 lembaga pengelola zakat yang ada di kabupaten Pati: Baznas, Laziznu, Lazismu, Laz Senyum Dhuafa dan LAZIS Jabalnur.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sama yang diambil dengan cara tertentu yang dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang mana seluruh populasi dijadikan sampel, dikarenakan jumlah populasi yang kecil, yaitu dibawah 100⁷⁵. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 44 sampel.

3.4 DEFINISI OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN DAN SKALA PENGUKURAN

Di bawah ini adalah penjelasan mengenai variabel penelitian dan pengukuran variabel penelitian dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1 Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
----------	----------	-----------	-------

199 ⁷³Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), hlm.

⁷⁴*ibid*, hlm 389

154 ⁷⁵Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), hlm.

Penelitian			Pengukuran
Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109)	Pedoman yang dirancang oleh pemerintah sebagai landasan untuk pengelola zakat, infak dan sedekah dalam menyusun laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan dan pengukuran zakat, infak dan sedekah • Penyajian zakat, infak dan sedekah • Pengungkapan Zakat, infak dan sedekah 	Diukur melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala likert
Sistem Informasi Akuntansi	Sistem yang dirancang untuk input data, mengolah data dan menyimpan data keuangan dan akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan internet digunakan secara optimal • Laporan keuangan terkomputerisasi • Tepat dan lengkap • Dimengerti dan memudahkan (Mutiara Kun Arifah Aini 2019) Zelda Triyani 2018 	Diukur melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala likert
Pengendalian internal	Proses secara keseluruhan yang dilakukan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem evaluasi kinerja • Pengendalian fisik • Pengolahan 	Diukur melalui penyebaran kuesioner

	kegiatan-kegiatan secara <i>continue</i> oleh pimpinan dan seluruh pegawai perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan aturan yang berlaku.	informasi	dengan menggunakan skala likert
Kompetensi Amil	Keahlian seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan wewenang dalam rangka meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan • Bidang pendidikan • Masa Kerja • Kode etik amil zakat Indonesia 	Diukur melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala likert

<i>Good Corporate Governance</i>	Pelaksanaan manajemen yang baik dalam tata kelola perusahaan yang meliputi proses, kebiasaan, kebijakan dan aturan yang dibuat dengan tujuan memberikan pengaruh dalam pengelolaan serta pengendalian dari suatu organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas • Pertanggungjawaban • Kemandirian • Kewajaran dan Kesetaraan 	Diukur melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala likert

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu prosedur yang menyimpulkan, mengorganisasi, menggrafiskan, dan secara umum mendeskripsi informasi-informasi kuantitatif tentang hal dan keberadaan suatu fenomena⁷⁶. Statistik deskriptif hanyalah memberikan deskripsi tanpa membuat kesimpulan atas suatu

⁷⁶Fred El Benu dan Agus S. Benu, *Metode penelitian kuantitatif ekonomi, sosiologi, komunikasi, administrasi, pertanian dan lainnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm: 191.

fenomena. Teknik analisis statistik deskriptif menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, modus, median, mean, desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase⁷⁷.

Dalam penelitian ini statistik deskriptif berfungsi untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden yang berasal dari 5 lembaga pengelola zakat di Kabupaten Pati melalui pengisian kuesioner mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (Psak 109), Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Amil Terhadap *Good Corporate Governance* dan mendeskripsikannya secara statistik meliputi mean, median, nilai minimum, dan nilai maksimum.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kolmogorov-Smirnov. Dalam uji kolmogorov-Smirnov dapat ditarik kesimpulan apabila *Probability value* > 0,05 maka H_0 diterima (data berdistribusi normal), sedangkan jika *Probability value* < 0,05 maka H_0 ditolak (data berdistribusi tidak normal).⁷⁸

Uji normalitas dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui apakah seluruh tanggapan dari responden berdistribusi normal atau tidak. Apabila data responden sudah

⁷⁷Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2018), hlm. 207

⁷⁸Nur Imamah, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Syariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Zakat*, Skripsi akuntansi: UIN Walisongo, 2020, hlm. 56

berdistribusi normal secara keseluruhan, maka dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk menemukan apakah model regresi memiliki korelasi antar satu atau semua variabel bebas (independen)⁷⁹. Jika antar satu atau semua variabel bebas memiliki korelasi maka antar variabel tersebut terjadi masalah multikolinieritas. Apabila terjadi multikolinieritas pada model regresi maka dikatakan tidak baik, sebaiknya salah satu dari variabel bebas dikeluarkan dan membentuk model baru.

Uji multikolinieritas disini berfungsi untuk mengetahui dari hasil tanggapan responden mengenai kuesioner yang diajukan, apakah antar variabel independen yang ada memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Antar variabel bebas seharusnya tidak memiliki hubungan yang kuat, sehingga apabila memiliki hubungan yang kuat, peneliti selanjutnya membuat model baru dengan mengeluarkan salah satu variabel yang memiliki hubungan yang kuat dan selanjutnya diujikan kembali kepada responden.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dalam suatu uji dapat diketahui melalui besaran *variance inflation factor* (VIF) dan *Tolerance*. Dari kedua besaran tersebut dapat ditarik kesimpulan jika *Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas, sedangkan jika *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas⁸⁰.

⁷⁹Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 107

⁸⁰ Ika Sanjaya, *Pengaruh Syariah Complien, Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru*, Skripsi Akuntansi: UIN SUSKA Riau, 2019, hlm. 70

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain, jika residual memiliki varian yang sama maka disebut homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji glejser. Uji glejser yaitu suatu uji yang dilakukan untuk melihat apakah suatu model regresi mempunyai indikasi heteroskedastisitas dengan melakukan regresi absolut residual dengan variabel bebas (independen) lainnya. Dari uji glejser tersebut dapat ditarik kesimpulan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas⁸¹.

3.5.3 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu uji yang memberikan penjelasan ketepatan satu alat ukur dan menentukan tepat atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji korelasi *person product moment*. Uji korelasi *person product moment* menghitung hubungan skor dari setiap pertanyaan yang tertuang dengan jumlah skor. Dari uji korelasi *person product moment* dapat ditarik kesimpulan jika tingkat signifikansi $< 0,05$ maka pertanyaan tersebut tidak valid,

⁸¹ Dyah Nirmala Arum Jenie, *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, (Semarang: Semarang University Press, 2012), hlm. 26

sedangkan jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid⁸²

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu uji untuk mengetahui tingkat stabilitas dari hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut akan digunakan kembali sebagai alat ukur dimasa yang akan datang. Suatu pertanyaan kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden atas pertanyaan tersebut stabil atau tetap dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan secara statistik dengan melihat nilai *cronbach alpha* (α), jika nilai *cronbach alpha* (α) $\geq 0,60$ maka variabel tersebut dikatakan reliabel⁸³.

3.5.4 Uji Ketepatan Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan suatu uji untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) mampu menerangkan variasi (perubahan) pada nilai variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi dapat diperoleh dari nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan dalam bentuk persentase. Dari uji koefisien determinasi dapat ditarik kesimpulan jika nilai koefisien kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbatas, namun jika nilai koefisien besar yaitu mendekati 1 maka kemampuan variabel independen hampir memberikan

⁸² Purnama Sari, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan BAZNAS Pekanbaru*, Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 52

⁸³ Agus tri basuki dan Nano prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 87

seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen⁸⁴.

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel akuntansi zakat, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan kompetensi amil mampu memberikan pengaruh terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

b. Uji F

Uji F atau uji simultan merupakan suatu uji untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Dalam uji F ini, tingkat signifikansinya sebesar 5%. Dari uji F dapat ditarik kesimpulan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, yang berarti semua variabel bebas (independen) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (dependen)⁸⁵

Uji F atau uji simultan berfungsi untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen yang ada memberikan pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini apakah variabel akuntansi zakat, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil secara bersama-sama memberikan pengaruh atau tidak terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

⁸⁴Desi Purnama Sari “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan BAZNAS Pekanbaru” Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 52

⁸⁵ Hardyansyah, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau, 2019, hlm. 46

3.5.5 Analisis Linier Regresi Berganda

Analisis linier regresi berganda merupakan suatu model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen⁸⁶. Dalam penelitian ini model regresi linier berganda menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1\text{SAZ} + \beta_2\text{SIA} + \beta_3\text{PI} + \beta_4\text{KA} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = nilai variabel dependen

β_0 = konstanta

$\beta_1\text{SAZ}$ = koefisien regresi variabel independen PSAK 109

$\beta_2\text{SIA}$ = koefisien regresi variabel independen sistem informasi akuntansi

$\beta_3\text{PI}$ = koefisien regresi variabel independen pengendalian internal

$\beta_4\text{KA}$ = koefisien regresi variabel independen kompetensi amil

ε = random error

3.5.6 Uji T (Hipotesis)

Uji T (hipotesis) merupakan suatu uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen⁸⁷. Uji T dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai t

⁸⁶Algifari, *Statistik Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016, hlm. 250

⁸⁷ghozali hal 97

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Dari hasil uji T, dapat ditarik kesimpulan jika nilai t hitung $>$ t tabel atau $\text{sig} <$ alfa maka H_a diterima dan H_o ditolak. Sebaliknya jika nilai t hitung $<$ t tabel atau $\text{sig} >$ alfa maka H_a ditolak dan H_o diterima⁸⁸.

Dalam penelitian ini uji T digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara individu memberikan pengaruh atau tidak terhadap *good corporate governance* sebagai variabel pada lembaga zakat di Kabupaten Pati. Sehingga dengan melakukan uji T parsial ini kita dapat mengetahui variabel independen apa saja yang berpengaruh terhadap variabel dependen, dan variabel independen apa saja yang tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen.

⁸⁸ Lusi Fatmawati, *Pengaruh Shariah Compliance, Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi SDM terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Akuntansi Syariah: IAIN Surakarta 2017, hlm. 51

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No 18, Pati. Pada awalnya BAZNAS Kabupaten Pati masih berstatus BAZDA Kabupaten Pati yang dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan surat Keputusan Bupati Pati⁸⁹. Dari pengukuhan ini BAZ belum berjalan dengan baik, belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan karena beberapa kendala antara lain :

1. Belum terbangunnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
2. Belum terbentuknya jaringan pengelola zakat dan sistemnya sehingga menyebabkan belum optimalnya pengaturan zakat.
3. Belum adanya peraturan daerah yang mengikat.
6. Belum adanya kepercayaan pada lembaga zakat (BAZ).

Pada tahun 2012, BAZDA Kabupaten Pati mulai memprogramkan penarikan iuran atau infaq kepada seluruh pegawai se- Kabupaten Pati dengan mengedarkan kupon. Sesuai dengan SK Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Pati. No. 468/01/I/2012 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kab. Pati untuk penggalan dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat khususnya PNS Kab. Pati. Kemudian pada tahun 2015 sesuai dengan SK Dirjen No DJ II/568 tahun 2014, maka BAZDA Kabupaten Pati

⁸⁹Wawancara dengan Abdullah Adib, tanggal 5 September 2022 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

ditetapkan pembentukannya menjadi BAZNAS Kabupaten Pati dengan SK No 451.12/2725 tahun 2015⁹⁰.

Struktur kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2021-2026 meliputi:

Ketua : H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd.
Waka I (Bidang Pengumpulan) : H. Sutaji, S.H., M.M.
Waka II (Bidang Distribusi) : Drs. H. M. Amari, M.Si.
Waka III (Bidang Perenc. Keuangan) : Drs. H. Dahwan Hadi, M.Si.
Waka IV (Bidang ADM, SDM & Umum) : KH. Abdul Hadi Kurdi
Kepala Unit Pelaksana : H. Muslihan, BA.
Staff bid. Administrasi : Abdullah Adib, S.Sos.I
Staff bid. Distribusi : Triya Nur Vianjaya
Staff Bid. Perenc. Keuangan : Ummi Rohmawati, S.Ag.
Staff Bid. SDM & Umum : Silvia Rizki Ardiningtyas

Pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Pati dalam mencapai tujuannya didasarkan pada visi, misi dan program kerja sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel sesuai tuntunan Agama Islam dan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

2. Misi

- a. Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan Zakat, Infak dan Shodaqoh.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan.

⁹⁰Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati 2021

- c. Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan Agama Islam dan Undang- Undang Republik Indonesia.
 - d. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para Mustahiq dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesama.
3. Program Kerja Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pati sebagai berikut⁹¹:
- a. PATI PEDULI

Program bantuanbencana dankebutuhankonsumtifuntuk fakir, miskin, ghorim, dan IbnuSabil berupa:

 - 1. Bantuan fakir miskin
 - 2. Ghorim
 - 3. Bantuanbedahrumah / rumahtidaklayakhuni
 - 4. Bantuanbencana
 - 5. Bantuansumurdalam
 - 6. Penjaga SD/ MI / SMP / MTs non PNS non K2.
 - b. PATI MAKMUR

Program bantuanekonomidengansystem pemberdayaan masyarakat untuk fakir, miskin, ghorim, muallaf, dan pengentaskan kemiskinan berupa:

 - 1. Bantuan modal usahakecil / MajelisTaklim
 - 2. Bantuanusahamandiri
 - 3. Bantuan desabinaan
 - 4. Bantuanalatkerja.
 - c. PATI SEHAT

Program bantuan untuk : fakir, miskin, dan muallaf berupa:

 - 1. Bantuan pengobatan masyarakat miskin.

⁹¹Dokumen profil BAZNAS Kabupaten Pati 2021

2. Bantuan kesehatan untuk masyarakat miskin Desa se-Kabupaten Pati
3. Khitanan massal
4. Pembuatan jamban
5. Penyediaan air bersih.

d. PATI CERDAS

Program bantuan pendidikan bagi pendidikan formal atau informal untuk fakir, miskin, muallaf, dan sabilillah dalam bentuk:

1. Bantuan beasiswa untuk siswa SMP / MTs.
2. Bantuan beasiswa untuk siswa SMA / SMK / MA
3. Beasiswa lanjut Sekolah untuk ketingkatan MA / SMA / SMK
4. Bantuan beasiswa untuk Mahasiswa kurang mampu
5. Tenaga Kependidikan Non PNS / Non K2.

e. PATI TAQWA

Program bantuan bagi syiar Islam untuk fakir, miskin, fisabilillah, ibnusabil, dan muallaf dalam bentuk:

1. Bantuan fisik Masjid / Musholla / TPQ.
2. Bantuan kegiatan syiar Islam (PHBI).
3. Bantuan mushaf Al Qur'an.
4. Bantuan bagi da'i / mubaligh.
5. Bantuan pantiasuhan.
6. Bantuan pensertifikatan tanah wakaf.
7. Membuat teks khutbah jum'at.
8. Pelatihan Muadzin / Bilal / Khotib / Imam.

4.1.2 LAZ Kabupaten Pati

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh lembaga amil zakat. Dalam penelitian ini, terdapat 4 lembaga amil zakat di Kabupaten Pati yang dijadikan tempat untuk penelitian yaitu NuCare Lazisnu, LazisMu, LAZ Senyum Dhuafa, dan Lazis Jabalnur.

Untuk mencapai tujuan masing masing lembaga, terdapat struktur kepengurusan, visi, misi dan program kerja yang dijadikan landasan. Berikut struktur kepengurusan, visi, misi , dan program kerja dari setiap LAZ di Kabupaten Pati:

1. NuCare LazisNu

a. Struktur Kepengurusan masa khidmat 2019-2024

Ketua : Muhammad Niam Sutaman, Lc.
LLM
Wakil Ketua : Irham Sodiq
Manager Administrasi : Ahmad Khoirun Niam
Manager Keuangan : Taufiqul Anam, SE.
Staff keuangan : Juita Intifada
Divisi Pengumpulan : Agus Arif Mustofa
Divisi Penyaluran : Siti Masruroh
Divisi Pelayanan Umat dan SDM : Muhammad Syaiful

b. Visi

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat⁹².

c. Misi

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
2. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak⁹³.

d. Program Kerja

⁹²Wawancara dengan Muhammad Niam Sutaman, tanggal 5 September 2022 di Kantor NU CARE LazisNu Kabupaten Pati.

⁹³<https://nucarepati.online/tentang-lazisnu-pati/> diakses 8 September 2022

1. Pendidikan : Sekolah Pesantren Maju (SPM)
 2. Kesehatan : Layanan Kesehatan Gratis (LKG)
 3. Pengembangan Ekonomi : Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN)
 4. Kebencanaan : NU CARE Siaga Bencana (NSB)
2. LazisMu
- a. Stuktur Kepengurusan⁹⁴

Ketua : Wahid Hidayat Aly, S.Psi, S.Pd.

Sekretaris: Santoso, S.E

Manager : Bukhori Muslim, S.T.

Divisi Program dan Ambulance : - Nico Sugiyanto
- Santosa, SE.

Divisi Fundraising : - Eka Nugraha, SM
- Novi Sulistyaningrum, S.Pd.

Divisi Adm. dan Keuangan : Ilfa Maulidatus Sholichah, SST.

Divisi Media : Desyana Suhandari
 - b. Visi

Menjadi lembaga amil zakat terpercaya.
 - c. Misi
 1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
 2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
 3. Optimalisasi layanan donatur.
 - d. Program Kerja yang meliputi⁹⁵:
 1. Pilar Ekonomi

⁹⁴Dokumen Laporan tahunan LazisMu Pati tahun 2021

⁹⁵www.lazismupati.org

- a. BERKAH (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera)
- 2. Pilar Sosial Kemanusiaan
 - a. Bedah Rumah
 - b. GEGANA (Gerakan Siaga Bencana)
 - c. SAYID (Santunan Yatim Dhuafa)
- 3. Pilar Pendidikan
 - a. BIDIK PINTAR (Beasiswa Pendidikan Pintar)
 - b. Bakti Guru
- 4. Pilar Kesehatan
 - a. SEHATI (Sahabat Sehat Sejati)
 - b. Ambulance gratis
 - c. Khitan Ceria
- 5. Pilar Tahunan
 - a. QurbanMu
 - b. RendangMu
- 6. Pilar Dakwah
 - a. Back to Masjid
 - b. Dai Mandiri
 - c. TCMu (Tahfidz Center Muhammadiyah)
- 3. LAZ Senyum Dhuafa
 - a. Struktur Kepengurusan⁹⁶
 - Direktur : H. Suparman Al Fatih, S.ST, MM
 - Sekretaris : Upadito Gurayudono, ST, MPsd.
 - Manajer Keuangan : Ahmad Zaenuri
 - Manajer Perencanaan : Anna Fauzia Hamsyah, S.Si
 - Manajer Penghimpunan : Eko Bejo Wahyono, ST.
 - Manajer Distribusi : Dwi santoso, S.Pi, S.Pd.
 - Manajer Pengembangan : Choirul Amin, S.Pd.
 - b. Visi

⁹⁶<https://senyumdhuafa.com/tentang-kami/> diakses 8 September 2022

Menjadi lembaga amil zakat, infak dan shadaqah (LAZIS) yang amanah, profesional, akuntabel dan kebanggaan umat dalam rangka pemberdayaan dhu'afa.

c. Misi

1. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah dan profesional
2. Mengoptimalkan potensi/ pemberdayaan umat melalui zakat, infak, shadaqah, wakaf (ZISWAF) dan dana sosial.
3. Membantu muzakki dalam menyalurkan ZIS nya kepada masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat (mustahik) dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

d. Program Kerja Laz Senyum Dhuafa meliputi⁹⁷:

1. SUTERA (Senyum Sejahtera) : bantuan yang diberikan kepada kaum dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam bentuk pemberian sembako dan kebutuhan lainnya
2. SEBAR (Senyum Berbagi Ramadhan) : program yang dilaksanakan pada bulan ramadhan dalam bentuk pemberian bingkisan, takjil, buka bersama dan pendistribusian zakat fitrah
3. Pemberdayaan ekonomi
4. PENA (Peduli Bencana)
5. Mobil layanan umat.

4. Lazis Jabalnur

a. Struktur Kepengurusan⁹⁸

Direktur : H. Sugiyanto, S.H

Manager Program : KH. Mahalli, M.Pd.I

⁹⁷<https://senyumdhuafa.com/tentang-kami/> diakses 9 September 2022

⁹⁸<https://www.jabalnurpati.com/p/lazis.html> diakses 9 September 2022

Manager Partnership	: Ahmad Rian Nova Rasyidi
Bagian Keuangan	: - H. Istono - Hj. Kumariyah, S.Pd., M.Si.
Bagian Online	: Hartono, S.Pd.
Staff Program	: - H. Ahmad Zaini Miftah, S.P - H. Tesa Garda Armita
Staff Partnership	: - Hj. Cucuk Sudi Agustianti - H. Yudi Harianto, S.T

b. Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dalam pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

c. Misi

1. Mengembangkan edukasi zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan layanan berkarakter berbasis teknologi.
2. Mengembangkan program yang terukur dan terus menerus untuk mendorong keberdayaan masyarakat.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana tanggapan responden atas fenomena yang diteliti melalui pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini responden berasal dari 5 lembaga zakat yang terapat di Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Pati
2. LazisNU Kabupaten Pati
3. LazisMu Kabupaten Pati
4. LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati
5. LAZIS Jabalnur Kabupaten Pati

Dalam penelitian ini sebanyak 40 kuesioner disebarkan ke 5 lembaga zakat yang terdapat di Kabupaten Pati. Dari 44 kuesioner

tersebut, 36 kuesioner yang kembali dan dapat diolah dalam penelitian ini. Seluruh responden dalam memberikan jawaban atas pernyataan pada kuesioner yang ada tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut maka perlu adanya pengelompokan pada setiap karakteristik yang ada. Dalam penelitian ini pengelompokan dilakukan atas dasar jenis kelamin, pendidikan, dan jenis lembaga dari responden.

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini meliputi laki-laki dan perempuan. Berikut pengelompokan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Responden	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
Laki-laki	24	67%
Perempuan	12	33%
Total	36	100%

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari jumlah 36 responden yang ada 24 responden diantaranya atau sebesar 67% berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 12 responden diantaranya atau sebesar 33% berjenis kelamin perempuan.

2. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan dalam penelitian ini meliputi jenjang SLTA, D3, S1, dan S2. Berikut pengelompokan karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan responden:

Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Responden

Jenjang Pendidikan	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
SLTA	10	28%
D3	0	0%
S1	20	56%
S2	6	17%
S3	0	0%
Total	36	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan terbanyak dari responden ini yaitu pada tingkat pendidikan S1 yaitu 56% atau 20 responden, diikuti responden dengan tingkat pendidikan SLTA yaitu 28% atau 10 responden, dan 17% atau 6 responden memiliki tingkat pendidikan S2. Dalam penelitian ini, responden yang memberikan tanggapannya terhadap kuesioner tidak ada yang berpendidikan D3 dan S2.

3. Jenis lembaga

Jenis lembaga yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini meliputi 5 lembaga, yaitu BAZNAS, LazisNu, LazisMu, Laz Senyum Dhuafa, dan LAZIS Jabalnur. Berikut pengelompokan responden berdasarkan jenis lembaga zakat responden:

Tabel 4.3 Jenis Lembaga Zakat

Jenis Lembaga Zakat	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>
BAZNAS	9	25%
LazisNu	10	28%
LazisMu	8	22%
LAZ Senyum Dhuafa	4	11%
Lazis Jabalnur	5	14%
Total	36	100%

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden terbanyak berasal dari lembaga zakat LazisNu yaitu sebesar 28% (10 responden), berikutnya berasal dari lembaga zakat BAZNAS yaitu sebesar 25% (9 responden), LazisMu sebesar 22% (8 responden), Lazis Jabalnur sebesar 14% (5 responden), dan terakhir yaitu LAZ Senyum Dhuafa sebesar 11% (4 responden).

Selain deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan jenis lembaga zakat, berikut hasil analisis uji statistik deskriptif berdasarkan SPSS:

Tabel 4.4 Uji Statistik Deskriptif

Statistics						
		PSAK 109	SIA	Pengendalia n internal	Komp. Amil	GCG
N	Valid	36	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		38,53	16,7 8	21,97	25,69	39,6 1
Median		38,50	16,5 0	22,50	26,00	39,5 0
Std. Deviation		3,418	1,53 3	2,223	2,412	3,49 1
Minimum		31	14	16	20	33
Maximum		47	20	25	30	49

Dari tabel hasil uji statistik deskriptif diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntansi zakat (PSAK 109)

Dari tabel hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat dari 36 data responden yang ada variabel akuntansi zakat (PSAK 109) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 38,53, standar deviasi sebesar 3,418, nilai minimum sebesar 31, dan nilai maksimum sebesar 47.

2. Sistem Informasi Akuntansi

Dari tabel hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat dari 36 data responden yang ada variabel sistem informasi akuntansi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,78, standar deviasi sebesar 1,533, nilai minimum sebesar 14, dan nilai maksimum sebesar 20.

3. Pengendalian Internal

Dari tabel hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat dari 36 data responden yang ada variabel pengendalian internal memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,97, standar deviasi

sebesar 2,223, nilai minimum sebesar 16, dan nilai maksimum sebesar 25.

4. Kompetensi Amil

Dari tabel hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat dari 36 data responden yang ada variabel kompetensi amil memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,69, standar deviasi sebesar 2,412, nilai minimum sebesar 20, dan nilai maksimum sebesar 30.

5. *Good Corporate Governance*

Dari tabel hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat dari 36 data responden yang ada variabel *good corporate governance* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 39,61, standar deviasi sebesar 3,491, nilai minimum sebesar 33, dan nilai maksimum sebesar 49.

4.2.2. Uji Instrumen Penelitian

A. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu uji yang memberikan penjelasan ketepatan satu alat ukur dan menentukan tepat atau tidaknya pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Dalam penelitian ini terdapat 36 responden yang diuji validitasnya. Suatu data dikatakan valid apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ dengan tingkat signifikansi 5 % (0,05). R tabel dapat kita peroleh dengan menentukan *degree of freedom* terlebih dahulu dengan rumus : $df = n - k$. N merupakan jumlah sampel yang kita gunakan dan k (konstanta) dengan angka 2, maka diperoleh $df = 36 - 2 = 34$. Dari perhitungan df tersebut dengan tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh r tabel senilai 0,3291. Berikut tabel hasil uji validitas :

Tabel 4.5 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
XI (PSAK	PSAK 109_1	0,598	0,3291	VALID

109)	PSAK 109_2	0,664	0,3291	VALID
	PSAK 109_3	0,610	0,3291	VALID
	PSAK 109_4	0,569	0,3291	VALID
	PSAK 109_5	0,494	0,3291	VALID
	PSAK 109_6	0,429	0,3291	VALID
	PSAK 109_7	0,633	0,3291	VALID
	PSAK 109_8	0,513	0,3291	VALID
	PSAK 109_9	0,580	0,3291	VALID
	PSAK 109_10	0,362	0,3291	VALID
X2 (Sistem Informasi Akuntansi)	SIA_1	0,488	0,3291	VALID
	SIA_2	0,758	0,3291	VALID
	SIA_3	0,812	0,3291	VALID
	SIA_4	0,745	0,3291	VALID
X3 (Pengendalian Internal)	Pengendalian Internal_1	0,781	0,3291	VALID
	Pengendalian Internal_2	0,805	0,3291	VALID
	Pengendalian Internal_3	0,805	0,3291	VALID
	Pengendalian Internal_4	0,742	0,3291	VALID
	Pengendalian Internal_5	0,489	0,3291	VALID
X4 (Kompetensi Amil)	Komp. Amil_1	0,657	0,3291	VALID
	Komp. Amil_2	0,711	0,3291	VALID
	Komp. Amil_3	0,591	0,3291	VALID
	Komp. Amil_4	0,679	0,3291	VALID
	Komp. Amil_5	0,678	0,3291	VALID
	Komp. Amil_6	0,502	0,3291	VALID
Y (Good Corporate Governance)	GCG_1	0,330	0,3291	VALID
	GCG_2	0,595	0,3291	VALID
	GCG_3	0,628	0,3291	VALID
	GCG_4	0,592	0,3291	VALID
	GCG_5	0,696	0,3291	VALID
	GCG_6	0,599	0,3291	VALID

	GCG_7	0,738	0,3291	VALID
	GCG_8	0,612	0,3291	VALID
	GCG_9	0,611	0,3291	VALID
	GCG_10	0,694	0,3291	VALID

Dari tabel hasil perhitungan uji validitas dengan 36 sampel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden memiliki r hitung $>$ r tabel, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan yang diajukan valid.

B. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu uji instrumen kestabilan pertanyaan jika digunakan di waktu yang akan datang. Berdasarkan teori yang ada, suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60. Berikut hasil perhitungan uji reliabilitas dari instrumen pertanyaan yang peneliti gunakan dalam kuesioner:

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach 'Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
X1 (PSAK 109)	0,727	0,60	Reliabel
X2 (SIA)	0,673	0,60	Reliabel
X3 (Pengendalian Internal)	0,780	0,60	Reliabel
X4 (Kompetensi Amil)	0,701	0,60	Reliabel
Y (<i>Good Corporate Governance</i>)	0,814	0,60	Reliabel

Dari hasil uji reliabilitas diatas, dapat kita lihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai kritis 0,60. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh

variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau stabil dari waktu ke waktu.

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebar secara normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan uji kolmogorov-Smirnov. Dalam uji kolmogorov-Smirnov kita dapat melihat pada *Probability value* nya. Ho dinyatakan diterima (data berdistribusi normal) jika *Probability value* $> 0,05$. Sedangkan Ho dinyatakan ditolak (data berdistribusi tidak normal) jika *Probability value* $< 0,05$. Berikut hasil uji normalitas dengan uji kolmogorov-Smirnov dari penelitian yang dilakukan:

Tabel 4.7 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,91666670
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,064
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov diatas, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig sebesar 0,200, yang memiliki arti bahwa *probability value* $> 0,05$. Berdasarkan teori uji kolomogrof-

smirnov, jika *probability value* > 0,05 maka H_0 dinyatakan diterima, yang berarti data berdistribusi normal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini tersebar secara normal atau berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas meruakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen memiliki hubungan atau tidak. Apabila antar satu variabel memiliki hubungan, maka terjadi multikolinieritas. Data yang mengalami multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Data dinyatakan terjadi multikolinieritas apabila *tolerance value* < 0,10 dan VIF > 10,0. Sebaliknya data yang baik dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10,0. Berikut hasil uji multikolinieritas dari penelitian yang dilakukan.

Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,078	6,139		,990	,330		
	PSAK 1-09	,584	,125	,572	4,689	,000	,654	1,529
	SIA	,568	,272	,250	2,089	,045	,682	1,467
	Pengendalian Internal	,468	,175	,298	2,680	,012	,787	1,271
	Komp. Amil	,459	,154	,317	2,972	,006	,855	1,170

a. Dependent Variable: GCG

Dari hasil uji normalitas diatas telah terlihat nilai *tolerance value* dan VIF dari setiap variabel independen. Berdasarkan teori yang ada, dapat disimpulkan antar satu variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas dikarenakan setiap variabel independen memiliki nilai *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10,0.

C. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk melihat apakah ada kesamaan antar varian residual dari satu penelitian dengan penelitian yang lain. Dalam uji heteroskedastisits ini menggunakan jenis uji glejser, yang mana melakukan regresi linier antara variabel *absolute residual* dengan variabel independen. Dari uji glejser tersebut dapat ditarik kesimpulan jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dari penelitian yang dilakukan:

Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,233	3,521		-,634	,531
	PSAK 109	-,060	,071	-,180	-,840	,407
	SIA	,232	,156	,312	1,487	,147
	Pengendalian Internal	,053	,100	,103	,528	,601
	Komp Amil	,039	,089	,083	,443	,661

a. Dependent Variable: Abs_Res

Dari tabel hasil uji heteroskedastisitas diaas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel independen yang diregresikan dengan variabel *absolute residual* memiliki nilai

signifikansi > 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4. Uji Ketepatan Model

A. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan suatu uji untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menerangkan perubahan pada variabel dependen.

Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,836 ^a	,699	,660	2,037
a. Predictors: (Constant), Komp. Amil, SIA, Pengendalian Internal, PSAK 1-09				
b. Dependent Variable: GCG				

Dari tabel uji koefisien determinasi diatas dilihat dari *Adjusted R Square* senilai 0,660, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil secara bersamaan memberikan pengaruh sebesar 66% terhadap *good corporate governance*.

B. Uji F

Uji F merupakan merupakan suatu uji untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Dalam uji F ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05). Berdasarkan teori jika nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti seluruh variabel independen secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut tabel hasil uji F dari penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 4.11 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	297,979	4	74,495	17,961	,000 ^b
	Residual	128,576	31	4,148		
	Total	426,556	35			
a. Dependent Variable: GCG						
b. Predictors: (Constant), Komp. Amil, SIA, Pengendalian Internal, PSAK 1-09						

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 17,961. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% sehingga diperoleh f tabel sebesar 2,64. Dapat disimpulkan bahwa nilai f hitung (17,961) > f tabel (2,64), sehingga dalam penelitian ini Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti seluruh variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.2.5. Analisis Linier Regresi Berganda

Analisis linier berganda merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil terhadap *good corporate governance*. Berikut tabel analisis regresi linier berganda dari penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 4.12 Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,078	6,139		,990	,330
	PSAK 1-09	,584	,125	,572	4,689	,000

	SIA	,568	,272	,250	2,089	,045
	Pengendalian Internal	,468	,175	,298	2,680	,012
	Komp. Amil	,459	,154	,317	2,972	,006
a. Dependent Variable: GCG						

$$Y = \beta_0 + \beta_1SAZ + \beta_2SIA + \beta_3PI + \beta_4KA + \varepsilon$$

$$Y = 6,078 + 0,584 + 0,564 + (-468) + 0,459 + \varepsilon$$

Interpretasi dari hasil analisis regresi linier berganda diatas yaitu:

1. Nilai konstanta sebesar 6,078 yang berarti apabila seluruh variabel independen yang meliputi akuntansi zakat (PSAK 109), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil tidak mengalami perubahan yang berarti bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu *good corporate governance* yaitu sebesar 6,078.
2. Akuntansi zakat (PSAK 109) (X1) terhadap *good corporate governance* (Y)
 Nilai koefisien dari akuntansi zakat (PSAK 109) yaitu sebesar 0,584 atau 58,4%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan akuntansi zakat (PSAK 109) sebesar 1% akan menaikkan kualitas *good corporate governance* sebesar 0,584 atau 58,4% dengan anggapan bahwa variabel independen yang lain dari bentuk regresi ini adalah tetap.
3. Sistem informasi akuntansi (X2) terhadap *good corporate governance* (Y)
 Nilai koefisien dari sistem informasi akuntansi yaitu sebesar 0,568 atau 56,8%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan sistem informasi akuntansi sebesar 1% akan menaikkan kualitas *good corporate governance* sebesar 0,568 atau 56,8% dengan anggapan bahwa variabel independen yang lain dari bentuk regresi ini adalah tetap.

4. Pengendalian internal (X3) terhadap *good corporate governance* (Y)

Nilai koefisien dari pengendalian internal yaitu sebesar 0,468 atau 46,8%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan pengendalian internal sebesar 1% akan menaikkan kualitas *good corporate governance* sebesar 0,468 atau 46,8% dengan anggapan bahwa variabel independen yang lain dari bentuk regresi ini adalah tetap.

5. Kompetensi amil (X4) terhadap *good corporate governance* (Y)

Nilai koefisien dari kompetensi amil yaitu sebesar 0,459 atau 45,9%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan kompetensi amil sebesar 1% akan menaikkan kualitas *good corporate governance* sebesar 0,459 atau 45,9% dengan anggapan bahwa variabel independen yang lain dari bentuk regresi ini adalah tetap.

4.2.6. Uji Hipotesis (T)

Uji hipotesis (T) merupakan suatu uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen secara individual memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam uji hipotesis (T) H_a diterima dan H_o ditolak jika nilai t hitung $>$ t tabel atau $\text{sig} < \alpha$. Sebaliknya jika nilai t hitung $<$ t tabel atau $\text{sig} > \alpha$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Dalam uji hipotesis ini menggunakan alfa 5% (0,05).

H_o : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut hasil analisis uji hipotesis (T) dari penelitian yang telah dilakukan:

Tabel 4.13 Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,078	6,139		,990	,330
	PSAK 1-09	,584	,125	,572	4,689	,000
	SIA	,568	,272	,250	2,089	,045
	Pengendalian Internal	,468	,175	,298	2,680	,012
	Komp. Amil	,459	,154	,317	2,972	,006
a. Dependent Variable: GCG						

Dari tabel diatas, pembuktian atas hipotesis yang telah ada sebagaimana berikut:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Penerapan PSAK 109 berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*” telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan uji hipotesis ini, variabel akuntansi zakat (PSAK 109) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel PSAK 109 berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
2. Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*” telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan uji hipotesis ini, variabel sistem informasi akuntansi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,045 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat

ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

3. Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*” telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan uji hipotesis ini, variabel pengendalian internal mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,012 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
4. Hipotesis pertama menyatakan bahwa “Kompetensi amil berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance*” telah terbukti kebenarannya. Berdasarkan uji hipotesis ini, variabel kompetensi amil mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,006 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti variabel kompetensi amil berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

4.3 Pembahasan dan Analisis Data

4.3.1 Pengaruh akuntansi zakat (PSAK 109) terhadap *good corporate governance*

Lembaga zakat merupakan sebuah lembaga publik yang bertanggung jawab atas segala pengelolaan dana zakat kepada para muzakki. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat maka perlu adanya laporan keuangan yang akuntabel, terstruktur dan

transparan. Akuntansi zakat merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tidak terkecuali lembaga zakat agar dapat menghasilkan laporan yang tepat, terstruktur dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, penerapan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Dapat dilihat pada nilai koefisien dari hasil uji regresi linier berganda. Nilai koefisien akuntansi zakat (PSAK 109) menunjukkan sebesar 0,584 atau 58,4% yang berarti setiap kenaikan akuntansi zakat (PSAK 109) sebesar 1% akan menaikkan kualitas *good corporate governance* sebesar 0,584 atau 58,4% pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Dariana Ruzita (2019) menyatakan bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan 109 berpengaruh secara positif signifikan terhadap implementasi *good corporate governance* pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Dibuktikan dengan hasil uji T parsial menunjukkan nilai signifikansi PSAK 109 sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti variabel PSAK 109 berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

Akuntansi zakat (PSAK 109) mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap *good corporate governance* di lembaga zakat Kabupaten Pati. Hal ini didukung beberapa faktor. Amil lembaga zakat di Kabupaten Pati telah menerapkan PSAK 109 dalam penulisan laporan keuangannya. Selain itu lembaga zakat yang ada di Kabupaten Pati juga telah diaudit eksternal berdasarkan PSAK 109 dan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian. Dengan adanya tertib administrasi dan tertib aturan mengenai laporan keuangan, maka dapat memberikan pengaruh terhadap *good corporate governance* pada

lembaga zakat di Kabupaten Pati terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi laporan keuangannya. Kegiatan seperti ini harus tetap dan terus diperbaiki untuk seluruh lembaga zakat di Kabupaten Pati. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akuntabel dan *good corporate governance* di lembaga zakat Kabupaten Pati juga akan terus lebih baik dan meningkat.

4.3.2 Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap *good corporate governance*

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang saling terpadu dalam membantu menyajikan informasi-informasi keuangan dari suatu lembaga. Lembaga zakat dalam perkembangannya perlu menerapkan suatu sistem akuntansi yang terstruktur dan mudah untuk diaplikasikan agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang transparan dan dapat mudah dipahami.

Dalam penelitian ini sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Dapat dilihat pada nilai koefisien dari hasil uji regresi linier berganda. Nilai koefisien sistem informasi akuntansi menunjukkan sebesar 0,568 atau 56,8% yang berarti setiap kenaikan sistem informasi akuntansi sebesar 1% akan menaikkan kualitas *good corporate governance* sebesar 0,568 atau 56,8%. pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Rika Ristiawati (2018) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Dibuktikan dengan uji T parsial, yang menunjukkan nilai signifikansi sistem informasi akuntansi sebesar 0,045 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

4.3.3 Pengaruh pengendalian internal terhadap *good corporate governance*

Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang dirancang untuk seluruh pengurus dan manajemen untuk menjalankan semua kegiatan berdasarkan aturan yang berlaku, dengan tujuan agar dapat dipertanggungjawabkan secara tepat kepada dewan pengawas maupun masyarakat luas. Dengan adanya pengendalian internal lembaga yang baik maka kegiatan lembaga dan pengelolaan lembaga akan berjalan secara terstruktur sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan terhindar dari adanya penyelewengan.

Dalam penelitian ini pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance*. Dapat dilihat pada nilai koefisien dari hasil uji regresi linier berganda. Nilai koefisien pengendalian internal yaitu sebesar 0,468 atau 46,8%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan pengendalian internal sebesar 1% akan menaikkan kualitas *good corporate governance* sebesar 0,468 atau 46,8% pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Desi Purnama Sari (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada BAZNAS Pekanbaru. Dibuktikan dengan uji T parsial yang menunjukkan nilai signifikansi pengendalian internal signifikansi sebesar 0,012 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

Penerapan sistem pengendalian internal pada lembaga zakat di Pati sudah cukup baik. Lembaga zakat yang ada di Pati sudah mempunyai sistem evaluasi kinerja yang baik dengan diadakan rapat berkala dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan pegawai. Selain itu beberapa lembaga di Kabupaten Pati telah di audit secara eksternal.

Namun lembaga zakat di Kabupaten Pati masih perlu untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, terutama bagi lembaga zakat yang masih baru beroperasi. Diharapkan seluruh lembaga zakat di Kabupaten Pati menerapkan sistem pengendalian internal yang baik di semua bagian agar sistem *good corporate governance* juga dapat terlaksana secara baik dan mengalami peningkatan, karena sistem pengendalian internal merupakan unsur dasar dalam menciptakan *good corporate governance*.

4.3.4 Pengaruh kompetensi amil terhadap *good corporate governance*

Peran manusia dalam setiap aktivitas pada suatu lembaga sangat penting, sehingga perlu memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki meliputi pengetahuan, kemampuan, motivasi, sifat, dan konsep diri. Lembaga zakat akan berkembang secara baik dan tata kelola yang baik apabila memiliki amil yang berkompeten. Dengan pengetahuan, kemampuan, konsep diri yang memadai maka lembaga zakat akan tumbuh dan berkembang lebih baik.

Dalam penelitian ini kompetensi amil berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati. Dapat dilihat pada nilai koefisien dari hasil uji regresi linier berganda. Nilai koefisien kompetensi amil yaitu sebesar 0,459 atau 45,9%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kenaikan kompetensi amil sebesar 1% akan menaikkan kualitas *good corporate governance* sebesar 0,459 atau 45,9% di lembaga zakat Kabupaten Pati.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* serta implikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang. Dibuktikan

dengan uji T parsial, yang menunjukkan nilai signifikansi kompetensi amil sebesar 0,006 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yang berarti variabel kompetensi amil berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

Kompetensi Amil pada lembaga zakat di Kabupaten Pati mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap *good corporate governance*. Namun pada kenyataannya lembaga zakat Kabupaten Pati masih perlu melakukan peningkatan kompetensi amil yang dimiliki. Pegawai pada lembaga zakat di Kabupaten Pati masih terdapat ketidaklinieran latar belakang pendidikan dengan bidang pekerjaannya. Dikhawatirkan kualitas kerja yang dihasilkan akan kurang memuaskan, namun dengan diimbangi kreativitas, *skill* dan pelatihan yang memadai maka akan membentuk tenaga amil yang berkompeten. Maka dari itu untuk menunjang kompetensi amil lembaga zakat di Kabupaten Pati dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing amil.

4.3.5 Pengaruh penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil secara simultan terhadap *good corporate governance*.

Penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil merupakan beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan *good corporate governance*. Dengan adanya penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, penggunaan sistem informasi akuntansi, pelaksanaan pengendalian internal yang tepat dan didukung dengan kompetensi amil yang baik maka dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan terhindar dari segala macam penyelewengan dalam pengelolaan dana zakat.

Dalam penelitian ini penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil secara bersamaan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati. Dilihat dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil secara bersamaan memberikan pengaruh sebesar 0,660 atau 66 % terhadap *good corporate governance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Rika Ristiawati tahun 2018 mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dan PSAK 109 memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Sumedang. Selain itu penelitian yang telah dilakukan Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi tahun 2018 mengungkapkan bahwa pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap implementasi *Good Corporate Governance*. Dibuktikan dengan hasil uji F (simultan) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil daripada 0,05 atau nilai f hitung sebesar 17,961 yang mana lebih besar daripada nilai f tabel sebesar 2,64. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti seluruh variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis data dan pembahasan analisis data yang telah diselesaikan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi ZIS (PSAK 109), sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji T parsial menunjukkan nilai signifikansi dari variabel standar akuntansi ZIS (PSAK 109) sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel PSAK 109 berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
2. Hasil uji T parsial menunjukkan nilai signifikansi dari variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,045 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
3. Hasil uji T parsial menunjukkan nilai signifikansi dari variabel pengendalian internal signifikansi sebesar 0,012 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.
4. Hasil uji T parsial menunjukkan nilai signifikansi dari variabel kompetensi amil sebesar 0,006 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan *level of signifikansi* (0,05). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel

kompetensi amil berpengaruh positif signifikan terhadap *good corporate governance* pada lembaga zakat di Kabupaten Pati.

5. Dari tabel uji koefisien determinasi dilihat dari *Adjusted R Square* senilai 0,660, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel PSAK 109, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi amil secara bersamaan memberikan pengaruh sebesar 66% terhadap *good corporate governance*. Selebihnya sebesar 34% *good corporate governance* dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, masih terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis. Berikut beberapa keterbatasan yang dialami penulis dalam melaksanakan penelitian ini:

1. Terbatas pada objek penelitian yang masih hanya dilingkup Kabupaten Pati. Sehingga hasil penelitian ini masih belum bisa dijadikan pedoman secara general untuk seluruh lembaga zakat yang ada di Indonesia.
2. Penelitian hanya dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Keterbatasan dari penyebaran kuesioner ini adalah kemungkinan terjadinya bias dari hasil jawaban kuesioner dikarenakan kemungkinan para responden yang mengisi jawaban hanya sekedarnya, formalitas saja. Selain itu kemungkinan pengisian kuesioner tidak dijawab secara langsung oleh yang bersangkutan.
3. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada 4 variabel yang menjadi faktor pengaruh terhadap *good corporate governance*.

5.3 Saran-Saran

Dari beberapa keterbatasan diatas, maka diperlukan saran dan masukan untuk pelaksanaan penelitian berikutnya agar menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk selanjutnya adanya perluasan wilayah yang menjadi objek penelitian.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bagi pihak peneliti untuk memberikan dampingan secara langsung terhadap responden dalam

mengisi kuesioner agar terjamin keaslian dari jawaban kuesioner yang terkumpul.

3. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain diluar 4 variabel diatas yang dapat memberikan pengaruh terhadap *good corporate governance*.
4. Bagi lembaga zakat di Kabupaten pati diharapkan adanya pelatihan keterampilan dan pelaksanaan uji kompetensi bagi amil yang bekerja sebagai upaya peningkatan kompetensi amil, sehingga lembaga zakat di Kabupaten Pati dapat berkembang lebih baik dan mengalami peningkatan tata kelola perusahaan.
5. Diharapkan bagi seluruh lembaga zakat di Kabupaten Pati untuk menerapkan sistem pengendalian yang tepat, baik dan secara menyeluruh agar tercipta lembaga zakat yang berkualitas dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aini, Mutiara Kun Arifah. 2019. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan PSAK No. 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Akuntansi: UIN SUSKA RIAU.
- Alkahfi, Bayu Dharmaga, dkk. 2020 *Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol 4.
- Anik dan Iin Emy Prastiwi. 2019. *Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity"*. STIE AAS Surakarta: Proceeding Seminar Nasional
- Aprilia, Lidya. 2017. *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah*. Skripsi Akuntansi: Universitas Sanata Dharma
- Arbi, Zulhidayatul. 2020. *Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak*. Skripsi Akuntansi: UIN SUSKA RIAU.
- Ardana, I Cenik dan Hendro Lukman. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arifah, Mutiara Kun. 2019. *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan PSAK No. 109 pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Pekanbaru*. Skripsi Akuntansi: UIN SUSKA RIAU
- Aspirandi, Rendy Mirwan. 2018. *Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi dalam Ilmu Islam Review of Accounting Information System on Islamic Science*. Universitas Muhammadiyah Jember: Prosiding 4th Seminar Nasional dan Call for Papers Fakultas Ekonomi.
- Basuki, Agus tri dan Nano prawoto. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Bodnar, George H. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi (edisi 9)*. Jakarta: Salemba Empat.

Budiman, Achmad Arief. 2012. *Good Governance pada Lembaga ZISWAF*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.

Dariana dan Ruzita. 2019. *Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Implementasi Good Corporate Governance*. STIE Syariah Bengkalis: Jurnal Akuntansi Syariah. Vol 3. No 2.

Dokumen profil BAZNAS Kabupaten Pati 2021

Dokumen Laporan tahunan LazisMu Pati tahun 2021

Effendi, M. Arief . 2017. *The Power Of Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam . 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafidhudin, Didin.2004. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Hamzah. 2019. *Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam. vol. 11

Hardyansyah. 2019. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Skripsi Akuntansi: UIN SyarifKasim Riau

<https://dataindonesia.id> di akses pada tanggal 19 maret 2022.

<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-72-psak-109-akuntansi-zakat-dan-infaksedekah> diakses 6 Mei 2022.

<https://jdih.patikab.go.id> diakses pada 3 Juni 2022.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/34/9/at-taubah-ayat-34> diakses pada 6 Juni 2022.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/60/9/at-taubah-ayat-60> diakses 3 Juni 2022.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/282/2/al-baqarah-ayat-282> diakses pada 6 juni 2022.

<http://mui.or.id/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf> diakses 17 Mei 2022.

<https://tafsirweb.com/10876-surat-as-shaff-ayat-4.html> diakses 5 juni 2022.

<https://tafsirweb.com/1039-surat-al-baqarah-ayat-273.html> diakses 20 September 2022

<https://www.gustani.id/2019/11/psak-109-akuntansi-zakat-dan.html?m=1> diakses
19 September 2022

<https://staff.blog.ui.ac.id/files/ED-PSAK-109.pdf> diakses 19 September 2022

<https://nuicarepati.online/tentang-lazisnu-pati/> diakses 8 September 2022

<https://senyumdhuafa.com/tentang-kami/> diakses 8 September 2022

<https://www.jabalnurpati.com/p/lazis.html> diakses 9 September 2022

<https://alhikmah.ac.id/syarat-wajib-zakat-dan-harta-yang-wajib-dizakati/>

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/batang/2021/09/17/dana-zakat-diduga-dikorupsi-lima-pimpinan-baznas-batang-mundur/>

<https://nasional.tempo.co/read/1615828/ini-fakta-perjalanan-kasus-act-hingga-petinggi-jadi-tersangka>

Imamah, Nur. 2020. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109), Syariah Compliance, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat*. Skripsi Akuntansi Syariah: UIN Walisongo.

Jenie, Dyah Nirmala Arum. 2012. *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press

Jurdi, Fatahullah. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Pengelolaan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing*. Malang: Intrans Publishing.

Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Mahatmyo, Atyanto. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.

Malhayatie. 2016. *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*. IAIN Lhokseumawe: Jurnal Al- mabhats. Vol 1. No 1.

Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurhayati, Sri, dkk. 2019. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rahman, Jeni dan evi martaseli. 2018. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten Sukabumi*. Jurnal ilmiah ilmu ekonomi. vol 6.
- Rahman, Taufikur. 2015. *Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi pengelola Zakat*. IAIN Salatiga: Jurnal Muqtasid. Vol 6. No 1.
- Robbins, S.P. 2007. *Perilaku Organisasi*. Indonesia: PT Macanan
- Romney, dkk. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information Systems*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sanjaya, I. 2019. *Pengaruh Syariah Compian, Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Kota Pekanbaru*. Skripsi Akuntansi; UIN SUSKA Riau.
- Sari, Desi Purnama. 2019. *“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan BAZNAS Pekanbaru”*. Skripsi Akuntansi: UIN Syarif Kasim Riau.
- Sugiyono. 2016. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supratiknya, Agustinus. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi*. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta
- Supriyadi, Ahmad. 2020. *Kompetensi Amil Zakat*. IAIN Tulungagung: el Barka. vol 3.
- Suryadi, Andi. 2018. *Mustahik dan Harta yang Wajib dizakati Menurut Kajian para Ulama*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin : TAZKIYA. Jurnal Keislaman. Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol 19. No 1.
- Tapanjeh, A. M. Abu. 2009. *Corporate Governance From The Islamic Perspective: A Comparative Analysis With OECD Principles*. Critical Perspective on Journal: Accounting. hlm. 105-177.
- Wardayati, Siti Maria. 2016. *Pengantar Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Koperasi*. Malang: Selaras Media
- www.Republika.co.id-Khanza diakses 20 Agustus 2022.
- Wawancara dengan Abdullah Adib, tanggal 5 September 2022 di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

Wawancara dengan Muhammad Niam Sutaman, tanggal 5 September 2022 di Kantor NU CARE LazisNu Kabupaten Pati.

Yasin, Ahmad Hadi. 2012. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER RESPONDEN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Kategori OPZ : () BAZNAS () LAZ

Nama OPZ :

Nama Responden :

Jenis kelamin : () pria () wanita

Pendidikan Terakhir : () SLTA () D3 () S1 () S2 () S3

Jabatan :

Lama Bekerja (Dalam tahun) : () 0-2 () 2-4 () 4-6 () 6-8 () 8 keatas

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Isilah kuesioner ini sesuai dengan penilaian anda dengan memberikan tanda centang (✓) pada kolom yang telah tersedia:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1. Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah (PSAK 109)

No	Deskripsi	STS	TS	N	S	SS
Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah						
1.	Zakat yang diterima dari <i>Muzakki</i> , diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas					

	tersebut.					
2.	Infak/ Sedekah yang diterima, diakui sebagai dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat sesuai dengan pemberi infak/ sedekah.					
3.	Infak/ sedekah yang diterima diakui dana amil untuk amil, dan dana infak/ sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.					
4.	Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, dan dana zakat untuk bagian non amil.					
5.	Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang dipisahkan dari dana zakat, dan dana infak/sedekah.					
6.	Penurunan nilai aset zakat, diakui sebagai: pengurangan dana zakat, jika terjadi <i>tidak</i> disebabkan oleh kelalaian amil tetapi jika disebabkan oleh kelalaian amil maka diakui sebagai dana kerugian dan pengurangan dana amil.					
7.	Pengukuran infak/ sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.					
Penyajian Zakat dan Infak/ Sedekah						
8.	Amil menyajikan dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)					
Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah						

9.	Amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pembagian dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, metode penentuan nilai wajar yang digunakan, rincian jumlah penyaluran dana zakat, hubungan istimewa antara amil dan <i>mustahiq</i> .					
10.	Amil mengungkapkan hal berikut: keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.					

2. Sistem Informasi Akuntansi

No	Deskripsi	STS	TS	N	S	SS
1.	Organisasi pengelolaan zakat mengharuskan karyawan menguasai prosedur sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan hasil kerja.					
2.	Seluruh kegiatan transaksi harus dicatat oleh fungsi akuntansi.					
3.	Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi perusahaan mampu mengidentifikasi masalah pencatatan.					
4.	Sistem informasi akuntansi yang digunakan mampu menyelesaikan masalah yang timbul akibat kelalaian pencatatan.					

3. Pengendalian Internal

No	Deskripsi	STS	TS	N	S	SS
1.	Organisasi Pengelola Zakat memiliki komitmen terhadap kompetensi/penataan karyawan					
2.	Terdapat pengendalian ketika perubahan program Manajemen dalam mengatur dan menetapkan kebijakan program.					
3.	Organisasi Pengelola Zakat memiliki sistem evaluasi kinerja					
4.	Terdapat pengendalian fisik pada asset di Organisasi Pengelola Zakat ini.					
5.	Terdapat prosedur audit pada organisasi pengelola zakat ini.					

4. Kompetensi Amil Zakat

No	Deskripsi	STS	TS	N	S	SS
1.	Amil mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan syariah berupa Al-Qur'an dan Hadist yang terkait dengan pengelolaan dana zakat					
2.	Latar belakang pendidikan amil pengelola zakat mempengaruhi kinerja.					
3.	Amil harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi syariah yang memadai.					
4.	Amil memiliki ketrampilan dalam					

	menyusun laporan keuangan dan keterampilan yang baik dalam memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan standar yang berlaku.					
5.	Semakin lama amil bekerja, semakin membuat amil mampu memahami pekerjaan					
6.	Sikap amil dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kode etik amil zakat.					

5. *Good Corporate Governance*

No	Deskripsi	STS	TS	N	S	SS
1.	Informasi mengenai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dapat dengan mudah dipahami dan diakses oleh <i>Muzakki</i> .					
2.	Organisasi pengelola zakat menyajikan laporan keuangan secara periodik dan tepat waktu.					
3.	Organisasi pengelola zakat menyampaikan informasi yang relevan dan dapat dibandingkan dengan organisasi pengelola zakat lainnya.					
4.	Organisasi pengelola zakat menyajikan laporan keuangan secara lengkap, yaitu meliputi laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.					
5.	Laporan Petanggungjawaban organisasi pengelola zakat dipublikasikan secara					

	terbuka melalui media masa.					
6.	Standar professional etika telah diterapkan dalam organisasi pengelola zakat bapak/ibu secara konsisten dan diberi sanksi kepada yang melanggar.					
7.	Dalam menjalankan operasinya, organisasi pengelola zakat bapak/ibu tidak melibatkan suatu kelembagaan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat					
8.	Visi, Misi dan tujuan Organisasi pengelola zakat serta strategi untuk mencapainya telah dipahami oleh seluruh pegawai.					
9.	Seluruh pegawai di organisasi pengelola zakat bapak/ibu dilibatkan dalam menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi pengelola zakat.					
10.	Dalam menyelesaikan konflik kepentingan antar pegawai, organisasi pengelola zakat mengadakan rapat secara berskala.					

2. Tabulasi Data

X1 : Standar Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109)

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	4	3	4	3	3	3	4
3	4	4	4	4	3	4	3	4	3
3	3	3	4	3	3	4	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
3	4	4	4	5	2	4	5	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	2
3	4	4	3	5	2	4	5	4	3
4	4	4	4	3	3	4	5	4	4
4	4	4	3	3	4	4	4	3	4
5	5	3	3	5	3	3	3	3	3
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	4	5	5	4	4
5	5	4	4	5	5	5	4	5	4
5	5	5	5	5	3	4	5	4	3
5	5	5	5	5	3	4	5	4	4
4	4	4	4	5	5	4	4	3	4
4	4	3	3	4	2	2	4	4	4
4	5	3	4	3	4	5	5	4	3
4	3	4	3	4	3	2	4	2	2
4	3	4	4	3	4	4	4	4	3
4	4	5	3	5	4	4	5	4	2
5	4	4	3	3	4	5	4	4	3
4	4	3	4	3	4	4	5	4	3
4	3	5	3	4	3	5	4	4	4
4	4	3	3	3	3	4	4	4	3
4	3	3	4	4	3	4	4	4	3

X2 : Sistem Informasi Akuntansi

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
4	5	4	4
4	5	4	4
4	5	4	5
4	4	4	4
4	4	4	4
4	5	4	4

4	4	4	4
4	5	4	4
3	4	3	4
4	4	4	4
4	5	5	5
4	4	4	4
4	4	4	4
5	5	5	4
4	4	4	4
4	5	4	4
4	5	4	4
4	4	4	3
4	5	5	5
4	4	4	4
4	4	4	4
5	5	5	5
5	5	5	5
4	5	5	5
4	5	5	5
4	5	4	4
4	4	3	4
4	4	3	4
5	4	4	4
5	4	3	3
4	3	4	4
4	5	4	4
4	5	3	4
5	5	4	4
4	4	5	3
4	4	3	4

X3 : Pengendalian Internal

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
4	5	4	4	5
4	4	4	4	4
4	5	4	4	5
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4	5	5	4	4
5	5	4	4	5

5	4	5	4	5
5	5	5	5	5
4	4	4	3	4
3	3	3	3	4
4	4	4	4	4
5	5	5	4	5
4	4	4	4	5
4	3	3	3	3
4	5	5	4	5
4	5	4	4	5
4	4	4	4	5
3	3	3	4	5
4	4	4	4	5
4	4	4	4	5
5	5	5	4	4
4	4	5	4	5
5	4	5	4	5
5	4	5	4	5
4	5	5	4	5
5	4	4	5	4
5	5	5	5	4
5	5	5	5	5
4	4	5	3	5
5	5	5	5	4
5	5	5	5	5
5	5	4	5	4
5	5	4	4	5
5	4	4	5	5
4	4	5	5	5

X4 : Kompetensi Amil

X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
4	5	4	4	4	4
4	4	5	5	5	4
4	4	4	4	4	4
4	5	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	5

5	5	5	4	5	5
3	4	5	3	4	5
3	3	4	3	3	4
4	3	3	4	3	4
4	4	3	4	3	4
4	3	3	4	5	4
4	4	5	5	3	4
4	3	3	4	5	5
5	4	3	4	5	4
4	5	3	4	5	4
5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	5	3	4	5	5
5	5	4	5	4	4
5	4	4	5	5	5
5	4	4	5	5	5
4	5	4	4	4	5
4	5	5	5	4	4
4	4	3	4	5	5
5	5	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	4
5	5	5	4	5	4
4	5	4	4	5	4
4	5	5	5	5	4
4	4	3	4	4	3
5	5	4	5	5	4

Y : *Good Corprate Governance*

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	4	4	3	4	3	3	4	3

4	3	4	4	4	4	3	3	3	3
3	4	3	5	5	4	3	5	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	5	4	3	4	3	3	4
3	4	4	4	3	4	5	4	4	4
3	4	4	4	4	4	5	4	3	4
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
4	4	5	4	4	4	4	5	5	5
4	4	5	5	5	4	5	5	4	5
4	4	5	5	5	4	5	5	4	5
4	4	4	5	4	4	4	5	5	4
4	4	4	5	3	4	3	4	2	3
4	4	3	3	4	4	4	5	3	5
4	4	4	3	3	4	3	4	4	3
4	5	4	4	4	5	5	4	3	3
4	4	4	5	3	5	4	4	4	5
4	4	4	3	3	3	4	5	4	4
4	4	4	3	3	4	4	4	3	4
4	4	4	3	3	4	4	4	3	4
4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
4	4	3	3	4	3	4	4	3	4

3. Uji Validitas

X1 : Standar Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK 109)

Correlations												
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1
X1 .1	Pearson Correlation	1	,505*	,283	,141	,257	,233	,213	,248	,391*	,030	,598**
	Sig. (2- tailed)		,002	,094	,411	,131	,172	,212	,144	,018	,862	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

X1 .2	Pearson Correlation	,505*	1	,171	,365*	,414*	,167	,236	,332*	,295	,203	,664**
	Sig. (2-tailed)	,002		,319	,029	,012	,329	,165	,048	,080	,235	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1 .3	Pearson Correlation	,283	,171	1	,370*	,494*	,065	,332*	,429*	,127	,006	,610**
	Sig. (2-tailed)	,094	,319		,026	,002	,707	,048	,009	,460	,974	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1 .4	Pearson Correlation	,141	,365*	,370*	1	,212	,192	,279	,254	,152	,174	,569**
	Sig. (2-tailed)	,411	,029	,026		,215	,262	,099	,135	,377	,311	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1 .5	Pearson Correlation	,257	,414*	,494*	,212	1	-,086	,002	,253	,088	-,025	,494**
	Sig. (2-tailed)	,131	,012	,002	,215		,619	,992	,137	,612	,885	,002
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1 .6	Pearson Correlation	,233	,167	,065	,192	-,086	1	,397*	-,136	,146	,232	,429**
	Sig. (2-tailed)	,172	,329	,707	,262	,619		,017	,429	,395	,174	,009
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1 .7	Pearson Correlation	,213	,236	,332*	,279	,002	,397*	1	,305	,519*	,163	,633**
	Sig. (2-tailed)	,212	,165	,048	,099	,992	,017		,071	,001	,343	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1 .8	Pearson Correlation	,248	,332*	,429*	,254	,253	-,136	,305	1	,288	-,080	,513**
	Sig. (2-tailed)	,144	,048	,009	,135	,137	,429	,071		,088	,641	,001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1 .9	Pearson Correlation	,391*	,295	,127	,152	,088	,146	,519*	,288	1	,246	,580**
	Sig. (2-tailed)	,018	,080	,460	,377	,612	,395	,001	,088		,148	,000

	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1 .1 0	Pearson Correlation	,030	,203	,006	,174	-,025	,232	,163	-,080	,246	1	,362*
	Sig. (2- tailed)	,862	,235	,974	,311	,885	,174	,343	,641	,148		,030
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X1	Pearson Correlation	,598*	,664*	,610*	,569*	,494*	,429*	,633*	,513*	,580*	,362*	1
	Sig. (2- tailed)	,000	,000	,000	,000	,002	,009	,000	,001	,000	,030	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												

X2 : Sistem Informasi Akuntansi

		Correlations				
		SIA.1	SIA.2	SIA.3	SIA.4	SIA
SIA.1	Pearson Correlation	1	,197	,291	,057	,488**
	Sig. (2-tailed)		,249	,085	,740	,003
	N	36	36	36	36	36
SIA.2	Pearson Correlation	,197	1	,410*	,499**	,758**
	Sig. (2-tailed)	,249		,013	,002	,000
	N	36	36	36	36	36
SIA.3	Pearson Correlation	,291	,410*	1	,502**	,812**
	Sig. (2-tailed)	,085	,013		,002	,000
	N	36	36	36	36	36
SIA.4	Pearson Correlation	,057	,499**	,502**	1	,745**
	Sig. (2-tailed)	,740	,002	,002		,000
	N	36	36	36	36	36
SIA	Pearson Correlation	,488**	,758**	,812**	,745**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,000	,000	
	N	36	36	36	36	36
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X3 : Pengendalian Internal

		Correlations					
		PI.1	PI.2	PI.3	PI.4	PI.5	PI
PI.1	Pearson Correlation	1	,559**	,559**	,600**	,093	,781**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,590	,000
	N	36	36	36	36	36	36
PI.2	Pearson Correlation	,559**	1	,588**	,485**	,249	,805**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,142	,000
	N	36	36	36	36	36	36
PI.3	Pearson Correlation	,559**	,588**	1	,412*	,331*	,805**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,013	,049	,000
	N	36	36	36	36	36	36
PI.4	Pearson Correlation	,600**	,485**	,412*	1	,187	,742**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,013		,274	,000
	N	36	36	36	36	36	36
PI.5	Pearson Correlation	,093	,249	,331*	,187	1	,489**
	Sig. (2-tailed)	,590	,142	,049	,274		,002
	N	36	36	36	36	36	36
PI	Pearson Correlation	,781**	,805**	,805**	,742**	,489**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,002	
	N	36	36	36	36	36	36
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).							
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).							

X4 : Kompetensi Amil

Correlations							
	Komp. Amil.1	Komp. Amil.2	Komp. Amil.3	Komp. Amil.4	Komp. Amil.5	Komp. Amil.6	Komp. Amil

Komp. Amil.1	Pearson Correlation	1	,412*	,034	,535**	,466**	,193	,657**
	Sig. (2-tailed)		,012	,843	,001	,004	,260	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Komp. Amil.2	Pearson Correlation	,412*	1	,398*	,337*	,310	,181	,711**
	Sig. (2-tailed)	,012		,016	,044	,066	,290	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Komp. Amil.3	Pearson Correlation	,034	,398*	1	,376*	,119	,165	,591**
	Sig. (2-tailed)	,843	,016		,024	,490	,335	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Komp. Amil.4	Pearson Correlation	,535**	,337*	,376*	1	,317	,096	,679**
	Sig. (2-tailed)	,001	,044	,024		,060	,576	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Komp. Amil.5	Pearson Correlation	,466**	,310	,119	,317	1	,386*	,678**
	Sig. (2-tailed)	,004	,066	,490	,060		,020	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36
Komp. Amil.6	Pearson Correlation	,193	,181	,165	,096	,386*	1	,502**
	Sig. (2-tailed)	,260	,290	,335	,576	,020		,002
	N	36	36	36	36	36	36	36
Komp. Amil	Pearson Correlation	,657**	,711**	,591**	,679**	,678**	,502**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,002	
	N	36	36	36	36	36	36	36
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).								
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).								

Y : Good Corporate Governance

Correlations												
		GCG. 1	GCG. 2	GCG. 3	GCG. 4	GCG. 5	GCG. 6	GCG. 7	GCG. 8	GCG. 9	GCG. 10	GCG
GCG. 1	Pearson Correlation	1	,223	,290	-,102	,059	,324	,000	,032	,388*	,244	,330*

	Sig. (2-tailed)		,191	,086	,554	,731	,054	1,000	,852	,019	,151	,050
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG. 2	Pearson Correlation	,223	1	,284	,215	,367*	,476*	,599*	,366*	,146	,252	,595**
	Sig. (2-tailed)	,191		,094	,209	,028	,003	,000	,028	,396	,137	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG. 3	Pearson Correlation	,290	,284	1	,384*	,245	,335*	,423*	,177	,412*	,351*	,628**
	Sig. (2-tailed)	,086	,094		,021	,150	,046	,010	,301	,013	,036	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG. 4	Pearson Correlation	-,102	,215	,384*	1	,575*	,429*	,259	,198	,205	,204	,592**
	Sig. (2-tailed)	,554	,209	,021		,000	,009	,126	,246	,229	,233	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG. 5	Pearson Correlation	,059	,367*	,245	,575*	1	,274	,483*	,470*	,235	,346*	,696**
	Sig. (2-tailed)	,731	,028	,150	,000		,106	,003	,004	,167	,038	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG. 6	Pearson Correlation	,324	,476*	,335*	,429*	,274	1	,378*	,198	,276	,196	,599**
	Sig. (2-tailed)	,054	,003	,046	,009	,106		,023	,247	,103	,251	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG. 7	Pearson Correlation	,000	,599*	,423*	,259	,483*	,378*	1	,449*	,278	,594**	,738**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,000	,010	,126	,003	,023		,006	,100	,000	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG. 8	Pearson Correlation	,032	,366*	,177	,198	,470*	,198	,449*	1	,273	,473**	,612**
	Sig. (2-tailed)	,852	,028	,301	,246	,004	,247	,006		,107	,004	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

GCG.9	Pearson Correlation	,388*	,146	,412*	,205	,235	,276	,278	,273	1	,488**	,611**
	Sig. (2-tailed)	,019	,396	,013	,229	,167	,103	,100	,107		,003	,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG.10	Pearson Correlation	,244	,252	,351*	,204	,346*	,196	,594*	,473*	,488*	1	,694**
	Sig. (2-tailed)	,151	,137	,036	,233	,038	,251	,000	,004	,003		,000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
GCG	Pearson Correlation	,330*	,595*	,628*	,592*	,696*	,599*	,738*	,612*	,611*	,694**	1
	Sig. (2-tailed)	,050	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												

4. Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,727	10

X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,673	4

X3

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,780	5

X4

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,701	6

Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,814	10

5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,91666670
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,064
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

6. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	6,078	6,139		,990	,330		
	PSAK 1-09	,584	,125	,572	4,689	,000	,654	1,529
	SIA	,568	,272	,250	2,089	,045	,682	1,467
	Pengendalian Internal	-,468	,175	-,298	-	,012	,787	1,271
	Komp. Amil	,459	,154	,317	2,972	,006	,855	1,170
a. Dependent Variable: GCG								

7. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,233	3,521		-,634	,531
	PSAK 109	-,060	,071	-,180	-,840	,407
	SIA	,232	,156	,312	1,487	,147
	Pengendalian Internal	,053	,100	,103	,528	,601
	Komp Amil	,039	,089	,083	,443	,661
a. Dependent Variable: Abs_Res						

8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,836 ^a	,699	,660	2,037
a. Predictors: (Constant), Komp. Amil, SIA, Pengendalian Internal, PSAK 1-09				
b. Dependent Variable: GCG				

9. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	297,979	4	74,495	17,961	,000 ^b
	Residual	128,576	31	4,148		

	Total	426,556	35			
a. Dependent Variable: GCG						
b. Predictors: (Constant), Komp. Amil, SIA, Pengendalian Internal, PSAK 1-09						

10. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,078	6,139		,990	,330
	PSAK 1-09	,584	,125	,572	4,689	,000
	SIA	,568	,272	,250	2,089	,045
	Pengendalian Internal	,468	,175	,298	2,680	,012
	Komp. Amil	,459	,154	,317	2,972	,006
a. Dependent Variable: GCG						

